

Sudirman Wilian

Dr. sudirman

SW PER
LIBRARY
SUDIRMAN WILIAN
JL. BANGIL VI / 13

LAPORAN HASIL PENELITIAN
REBAH STRATEGIS NASIONAL.



JUDUL PENELITIAN

ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
PADA PROGRAM PENUNTASAN KEAKSARAAN DI PULAU LOMBOK NTB

Oleh:

- Drs. I Nyoman Karma, M.Si (Ketua)
- Drs. I Nyoman Suarta, M.Si (Anggota)
- Dr. Syafudin, M.S (Anggota)
- Dr. Sudirman Wilian, MA. (Anggota) ✓

Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009
Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KECURUKAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
DESEMBER 2009

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH STRATEGIS NASIONAL**



JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)
PADA PROGRAM PENUNTASAN KEAKSARAAN DI PULAU LOMBOK NTB**

Oleh:

**Drs. I Nyoman Karma, M.Si (Ketua)
Drs. I Nyoman Suarta, M.Si (Anggota)
Dr. Syafrudin, M.S (Anggota)
Dr. Sudirman Wilian, MA. (Anggota)**

**Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009
Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008**

**JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
DESEMBER 2009**

SUDIRMAN WILIAN
JL. BANGIL V

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009

1. Judul Penelitian:

Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis (Bintek) Pada Program Penuntasan Pendidikan Keaksaraan di Pulau Lombok NTB.

2. Ketua Peneliti:

2.1. Data Pribadi:

- a. Nama Lengkap : Drs. I Nyoman Karma, M.Si.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP/Golongan : 195912311986031020/IV/b
d. Strata/Jab.Fungsional : Lektor Kepala
e. Fakultas/Jurusan : FKIP/Pendidikan
f. Bidang Ilmu : Kependidikan


2.2. Anggota Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Drs. I Nyoman Suarta, M.Si	Kependidikan	FKIP UNRAM	10
2	Dr. Syafrudin, M.S	Sosiologi	FKIP UNRAM	10
3	Dr. Sudirman Wilian, MA.	<i>Sociolinguistics</i>	FKIP UNRAM	10


3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka waktu Penelitian : 8 Bulan
b. Lokasi Penelitian : Pulau Lombok
c. Biaya Yang Diajukan : Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh Juta Rupiah)

Mengetahui,
DIPKIP UNRAM
Dekan FKIP Universitas Mataram,


Dr. H. Rusdiawan, M.Pd.
NIP. 19705111982031002

Mataram, 2 Desember 2009
Ketua Peneliti,


Drs. I Nyoman Karma, M.Si.
NIP. 195912311986031020

Menyetujui,
Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua

Prof. I. H. Yusun Akhyar Sutaryono, Ph.D
NIP. 196110261985031003

RINGKASAN

I Nyoman Karma, dkk., 2009. Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis (Bintek) Pada Program Penuntasan Pendidikan Keaksaraan di Pulau Lombok NTB. Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008.

Pada lingkup nasional, Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya tingkat melek aksara yang merupakan faktor penghambat peningkatan produktivitas secara agregat. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya jumlah penduduk buta aksara (14,6 juta orang pada tahun 2005). Negara Indonesia masih termasuk di dalam 34 negara di dunia yang buta aksaranya di atas 10 juta orang. Rendahnya tingkat melek aksara ini, di samping merupakan pelanggaran terhadap HAM juga merupakan faktor yang kurang mendukung terhadap berkembangnya kohesi sosial, perkembangan budaya, serta partisipasi politik yang sehat. Oleh UNISCO secara ekonomi sudah ditemukan bahwa peningkatan melek aksara akan mendorong pertumbuhan produktivitas individu sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat (Ace Suryadi, 2006).

BPS NTB mencatat bahwa sebanyak 615.823 orang atau sekitar 21,21% jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menyandang buta aksara. Di mana Kabupaten Lombok tengah merupakan daerah yang paling banyak jumlah penduduk buta aksara, yakni sekitar 179.946 orang (39%), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 142.376 orang (20,79%), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 142.476 orang (20,79%), Kabupaten Bima sebanyak 37.965 orang, Kabupaten Sumbawa 28.944 orang, Kabupaten Dompu 30.923 orang, Kota Mataram 32.616 orang dan kota Bima 8.470 orang. Sedang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan daerah paling sedikit penduduk buta aksara yakni sekitar 6.098 orang (9,39%). Menurut Martinus tingginya angka buta aksara di NTB disebabkan empat faktor: 1) kurangnya fasilitas pembelajaran di masyarakat, sehingga anak-anak yang semestinya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menjadi terhambat, 2) tingginya angka dropout siswa, 3) faktor kemiskinan dan 4) budaya masyarakat. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah angka buta aksara di NTB dengan klasifikasi 15 tahun ke atas, penduduk perempuan jumlahnya lebih tinggi, yakni 410.989 orang (26,45%) dan penduduk laki-laki sebanyak 204.834 orang (15,18%) (Martinus, 2007).

Kegagalan ini banyak diakibatkan karena apa yang dilakukan selama ini tidak terencana dengan tepat, tidak terprogram dan tidak terevaluasi dengan baik yang berakibat pada tidak tepatnya sasaran yang akan diharapkan. Melalui program yang kami usulkan ini akan bisa menjawab dan memecahkan persoalan itu dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, seperti yang tertera pada halaman mengenai Skenario Pelaksanaan Bintek yang menawarkan model baru pelaksanaan bintek, dan Rincian Sasaran Bintek yang lebih akomodatif dan Monev yang lebih rinci yang dapat menggali persoalan lapangan karena menggunakan metode triangulasi yang terbaru, baik pada teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah: 1) Menyusun strategi pelaksanaan bintek, yang mencakup kiat-kiat dalam pelaksanaan bintek; 2) Menemukan pendekatan yang akan digunakan pada keaksaraan fungsional, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat; 3) Tersusunnya bentuk dan model pelaksanaan Bintek dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat, sehingga penuntasan buta aksara dapat terhapuskan.

Rancangan penelitian disusun sesuai dengan *prosedur dan tahapan Bintek* yang terdiri dari: Survei Lapangan; Identifikasi, Pengolahan, dan Analisis Data; Penetapan Program; Penyamaan

Persepsi Tim Bintek; Implementasi Program (*Pelaksanaan Bintek*); Evaluasi Implementasi Program Bintek; dan Revisi dan Penetapan Model Akhir Implementasi Program. *Formulasi cara kerja Bintek* terdiri dari: penyamaan persepsi tim Bintek, pengenalan obyek dan subyek pendidikan keaksaraan, analisis dan penetapan model pendidikan keaksaraan, implemntasi dan pendampingan terhadap subyek dan obyek pendidikan keaksaraan, penemuan model akhir pendidikan keaksaraan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin jauh komunitas dari pusat kota, maka makin tinggi tingkat angka buta aksara dari komunitas tersebut. Kecenderungan tersebut nampak tidak merata pada setiap Kecamatan. Hal ini terkait dengan faktor geografis dan luas wilayah Kecamatan, faktor ekonomi masyarakat, faktor keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta jarak tempuh yang cukup jauh dan alat transportasi yang sulit.

Dari rekapitulasi data hasil penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk buta aksara yang paling sedikit (rendah) dari empat Kabupaten/Kota di Pulau Lombok adalah Kota Mataram, yakni : 2,79 % dari jumlah penduduk buta aksara di Lombok “180.344” (Sumber Data Penelitian Dinas Dikpora NTB, 2007), yakni : 5.026 orang. Sementara Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ke dua tingginya, yakni : 26,15 %, dan Kabupaten Lombok Tengah menempati urutan ke tiga tingginya, yakni : 34,84 %; sedangkan Kabupaten Lombok Timur menempati urutan ke empat, yang merupakan peringkat paling tinggi jumlah penduduknya mengalami buta aksara, yakni : 36,22 %. Dari hasil analisis data di atas, juga diperoleh gambaran bahwa semakin komunitas itu jauh dari daerah perkotaan, maka makin tinggi tingkat buta aksara yang dialami komunitas tersebut.

Faktor utama penyebab tingginya buta aksara di Pulau Lombok berdasarkan hasil analisis data penelitian ini adalah: 1) hambatan geografis dan demografis, dimana kelompok buta aksara sebanyak 83,67% yakni sekitar 150.896 orang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil dan terisolir, dengan latar belakang ekonomi yang lemah; 2) Latar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) yang masih tergolong rendah, mengakibatkan rendahnya motivasi dan minat mereka untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara; 3) Alokasi anggaran untuk penuntasan pemberantasan buta aksara dari APBN pusat maupun dari Pemerintah Daerah belum cukup memadai, di samping cairnya anggaran tersebut hampir selalu terlambat, sehingga sasaran yang harus dilayani belum tergarap secara menyeluruh dan tuntas pada setiap tahapan pelaksanaan program Getas Aksara.

Di samping itu, bila dilihat dari usia kelompok masyarakat yang buta aksara yakni : antara usia 30 – 45 Tahun, tingginya angka buta aksara di Pulau Lombok juga disebabkan beberapa faktor yang secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut : 1) kurangnya fasilitas pembelajaran di masyarakat, yaitu kurangnya gedung sekolah dan jumlah guru saat itu sangat sedikit, sehingga anak-anak yang semestinya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menjadi terhambat, 2) jauhnya komunitas dari pusat sekolah dan alat transportasi yang kurang memadai, serta sulit dijangkau dengan berjalan kaki, mengakibatkan tingginya angka dropout siswa, 3) faktor kemiskinan, yaitu rendahnya pendapatan perkapita masyarakat menyebabkan fokus perhatian masyarakat lebih kepada upaya memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya, dan masalah pendidikan anak-anaknya cenderung terabaikan, dan 4) sosial budaya masyarakat, yakni : pandangan masyarakat tentang “banyak anak banyak rejeki”, “untuk apa sekolah toh juga tidak menjadi pegawai”, dan “kawin musiman” atau kawin cerai, turut memberi andil terhadap tingginya buta aksara di Pulau Lombok.

Kriteria model bintek dan belajar yang dikembangkan untuk mencapai target atau tercapainya ketuntasan buta aksara lebih tinggi sebagai berikut : (1) kegiatan dilakukan berbasis masyarakat; (2) melibatkan dan memfungsikan SDM setempat; (3) pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan; (4) pembinaan dan pendampingan dilakukan secara komprehensif; (5) pembelajaran bersifat fungsional; (6) Pembina, pendamping, dan tutor memiliki jiwa polentir atau mempunyai rasa pengabdian terhadap masyarakatnya sendiri; (7) frekwensi pertemuan untuk pembinaan sering; (8) adanya kesamaan persepsi untuk semua pihak dan elemen yang terlibat.

Model bintek yang dihasilkan merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari dua tahap bintek, dan di masing-masing tahap bintek terdiri dari beberapa tahap kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Model pembelajaran dalam keaksaraan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan model belajar berbasis masyarakat dan berbasis keluarga secara sinergis, yang dalam penerapannya dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa melakukan pembenahan dan atau perbaikan penerapannya.

SUMMARY

I Nyoman Karma, at.al. 2009. An Analysis of Technical Guidance Implementation Model for the Irradication of Illitaracy Program in Lombok NTB. Funded by DIPA Mataram University, 2009 No. 0234.0/023-04.2.2/XXI/2008, Desember 31, 2008

Nationally, Indonesia is still facing the very low rate of illiteracy as one major factor of increasing productivity. This is shown by the large number of illiterate population (around 14,6 million in 2005). Indonesia is still one of the 34 countries over the world whose illiteracy figure is above 10 million people. This high rate of illiteracy, not only is it against human right, but it is also the factor which does not support social cohesion, cultural development, as well as good political participation. Economically UNESCO has found out that high literacy rate will help enhance individual productivity so that it would also help develop economic aggregate (Ace suryadi, 2006).

BPS NTB noted that approximately 615.823 people or 21,21 % of the total population aged 15 years above are illiterate, where Central Lombok has the highest figure, around 179.946 people (39 %). East Lombok has 142.376 illiterate 20.79, West Lombok 142.476 (20.79), Bima 37.965, Sumbawa 28.944, Dompu 30.923, Mataram 32.616, and the city of Bima 8.470. West Sumbawa has the lowest illiteracy rate, with only 6.098 people (9.39). According to Martinus, the high rate of illiteracy in NTB is due to several factors : 1. The minimum learning facility in the community, so that children can not go to the higher level of Schooling. 2. Drop out rate is also high. 3. Poverty factor, 4. Cultural. From gender perspective, the number of women in NTB aged above 15 is higher, that is 410.989 (26.45 %) while men 204.834 (15.18 % Martinus, 2007).

This failure is as much caused by the inappropriate and not well planning, unprogrammed, and unevaluated, which caused the unexpected target. Through this program it is hoped that it will help answer and solve the problem by the program offered as mentioned on the page of Technical Guidance Scenario, offering new technical guidance model with its elaboration, its monitoring and evaluation, which can seek the problem in the community using the newest triangulation model, either in data collection, source of data, and data analysis.

This research is aimed 1) to construct implementation strategy of technical guidance, 2) to find out an approach that could be used in the functional literacy, adjustable with the condition and need at place, 3) Constructing the form and the model of technical guidance (*Bintek*) to increase the community participation, so that illiteracy can be eradicated.

Research plan is composed in accordance with the procedure and stages of *Bintek*, comprising : 1) field survey, identification, data analysis, putting up the program, building up common perception of team, program implementation (*Bintek* implementation), program implementation evaluation, revising and deciding the last model of program. Formulating *Bintek* work operation : building up common perception, familiarizing the object and subject of literacy education, analyzing and deciding the model, implementing and accompanying the subject and object of literacy education, determining the last model of education.

This research finds out that there is a tendency that the farther the community is located from the city, the larger the number of illiteracy in that place. However, the tendency does not exist in every district due to large geographical area and economical problem of the community, limited education infrastructure, long distance place as well as difficult means of transportation.

Based on the data analysis, it is shown that the least illiteracy rate out of the four districts in Lombok are, Mataram (2,79 % = 5.026), out of the whole number of illiteracy in Lombok (180.344), then west Lombok comes the second least, 26,15 %, and Central Lombok get the highest rank in illiteracy rate in Lombok (34,84 %), followed by East Lombok, the population of which is the highest in Lombok with 36,22 % illiteracy. It also reveals that the farther the community from a town the higher the number of illiteracy in that place.

The main causes of high number of illiterate people in Lombok based on the data analyzed in this study are: 1) geographically and demographically obstacle, the percentage of illiterate people is 83,67% (150.896 people). Those people live in remote area and economically in low level; 2) economy background and level of education (especially villagers) is considered low. This condition affects their motivation and interest to follow the literate program low; 3) the funding for this program from the Government centre or local is not sufficient to cost program, besides the funding sent to the committee is not on time, as a result the program cannot be completed perfectly at any stage of the planning of the *Getas Aksara* program.

On the other hand, if it is viewed from the age-group of the illiterate people which is between 30 – 45 years old, high number of illiterate people in Lombok is also contributed by following matters: 1) lack of learning facilities in the society, it is small number of schools and teachers which caused them cannot pursue their higher education ; 2) high number of drop out students which is influenced by the distance from the school to the people's house is very far and transportation mean is not available any time during the school hours; 3) poverty, low income caused people to put more attention on feeding their family than educating their children; and 4) social life and culture of the society makes people think that "more children more money", "No need to go to school because we can't be a civil servant" and "seasoned married" or "divorce married culture". Those affect the number of illiterate people high.

Technology guidance and learning model developed to achieve the target or to make people illiterate are as follows: (1) activity is society base; (2) involving local people; (3) continuous guiding; (4) comprehensive guiding; (5) functional learning style; (6) dedicated and responsible guide or tutor applied; (7) high frequency of meeting to share between the tutor and the guidance; (8) have the same vision among all the stake holders who involved in the program.

Technology guidance resulted from the research is society's involvement model which consists of two stages. Each stage supported by some continuous sub-stages of activities.

Learning model of literate program resulted from the research is society base learning model and family-synergy base learning. To complete the literate program, the application of these two models has to be continuous. Any difficulties in the application of the models is reviewed and corrected.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian dan laporan “Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis (Bintek) Pada Program Penuntasan Pendidikan Keaksaraan di Pulau Lombok NTB”, dapat diselesaikan sesuai rencana. Sesuai dengan tujuan penelitian, laporan ini berisi tentang hasil “Analisis Model, Implementasi Program (*Pelaksanaan Bintek*) dan Penetapan Model Akhir Implementasi Program”.

Kegiatan penelitian ini dibiayai dengan dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009, dengan Nomor : 62-SP.SN./H18.12.2/PL/2009.

Laporan penelitian ini tersusun atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, maka melalui kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dirjen Dikti, Depdiknas, Jakarta.
2. Rektor Universitas Mataram
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.
5. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas bantuannya dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

Semoga semua pihak yang turut membantu dalam upaya merampungkan penelitian ini, mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal bhaktinya.

Disadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan dan banyak hal yang mungkin terlewatkan, sehingga laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini diharapkan memperoleh saran, kritik, dan masukan, bagi penyempurnaan pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya, diharapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya di Universitas Mataram.

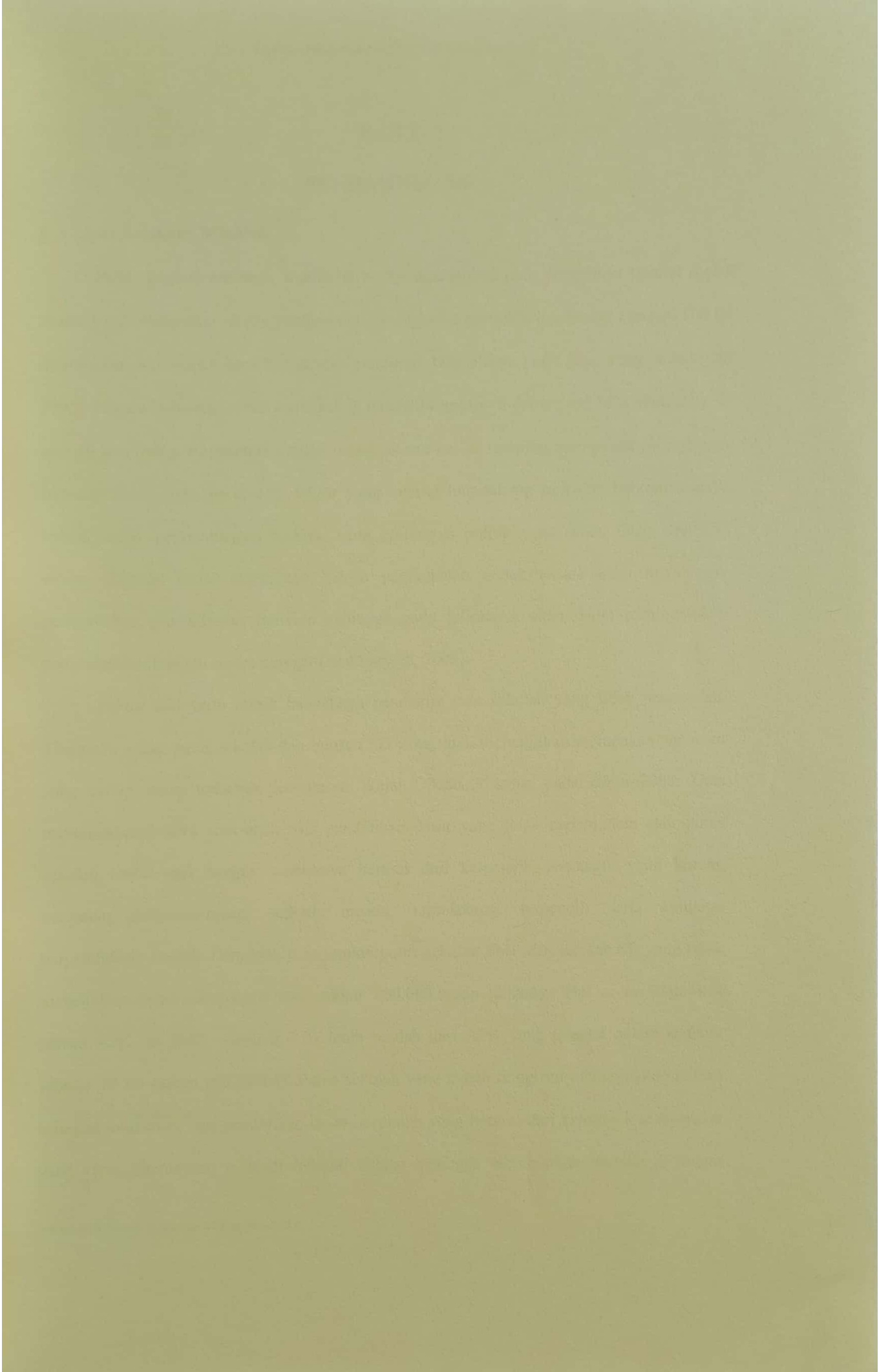
Mataram, Desember 2009

Tim Bintek,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Tujuan Khusus	2
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	3
BAB II. STUDI PUSTAKA	5
BAB III METODE PENELITIAN DAN TAHAPAN SKENARIO KEGIATAN	
3.1 Skenario Pelaksanaan Bintek	13
3.2 Sasaran Bintek	15
3.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Bintek	17
3.4 Instrumen Bintek	17
BAB IV DATA HASIL PENELITIAN	
4.1 Data Umum Program Getas Aksara Di Pulau Lombok	22
4.2 Data Pamong Belajar Sebagai Responden.....	34
4.3 Data Warga Belajar Sebagai Subjek Penelitian	36
BAB V PENGEMBANGAN MODEL BINTEK	
5.1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya buta aksara	39
5.2. Pengembangan Model Bintek dan Pembelajaran	41

BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	49
6.2. Saran Tindak	50
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pada lingkup nasional, Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya tingkat melek aksara yang merupakan faktor penghambat peningkatan produktivitas secara agregat. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya jumlah penduduk buta aksara (14,6 juta orang pada tahun 2005). Negara Indonesia masih termasuk di dalam 34 negara di dunia yang buta aksaranya di atas 10 juta orang. Rendahnya tingkat melek aksara ini, di samping merupakan pelanggaran terhadap HAM juga merupakan faktor yang kurang mendukung terhadap berkembangnya kohesi sosial, perkembangan budaya, serta partisipasi politik yang sehat. Oleh UNISCO secara ekonomi sudah ditemukan bahwa peningkatan melek aksara akan mendorong pertumbuhan produktivitas individu sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat (Ace Suryadi, 2006).

Faktor lain yaitu masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Tingginya angka putus sekolah dan lulusan SD yang tidak melanjutkan merupakan ancaman yang cukup serius terhadap penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun pada tahun 2008. Data menunjukkan bahwa anak-anak usia pendidikan dasar yang tidak melanjutkan atau putus sekolah terdiri dari hampir seluruhnya berasal dari kelompok penduduk yang kurang beruntung (*disadvantages*) seperti: miskin, terbelakang, terpencil, serta keluarga berpendidikan rendah. Demikian pula jumlah putus sekolah SMP dan lulusan SD yang tidak melanjutkan masih cukup besar yaitu sekitar 800.000 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa APK riil SMP menjadi 9 % lebih rendah dari APK yang tercatat dalam statistik sebesar 78,3% (tahun 2003/2004). Putus sekolah yang masih tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian anak-anak usia pendidikan dasar, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjadi terhenti belajar sehingga membiarkan mereka di dalam

keterbelakangan dan kemiskinan karena tidak berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dasar yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya kelak (Ace Suryadi,2006).

Pada aspek lain yaitu rendahnya budaya baca, hal ini akan menimbulkan hambatan dalam upaya pemerintah menciptakan masyarakat belajar (*learning society*), sehingga mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara lain dalam era persaingan. Peringkat Indonesia yang sangat rendah (peringkat 39 dari 41 negara) dalam kemampuan membaca anak-anak usia 13 tahun seperti yang ditunjukkan oleh studi *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2003 merupakan tantangan yang sangat mendasar bagi program-program PLS khususnya Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Mulai tahun 2006, Ditjen PLS ditantang untuk melakukan revitalisasi program ini dalam kerangka peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat yang menjadi sasaran PLS, melalui skema *blockgrant*.

Data BPS tahun 2005 mencatat, bahwa faktor utama yang menghambat upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia adalah: 1) hambatan geografis dan demografis, dimana kelompok buta aksara sebanyak 67% berasal dari jenis kelamin perempuan, dengan latar ekonomi yang lemah dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan terisolir; 2) adanya kelompok buta aksara yang berumur di atas 45 tahun, kelompok ini disebut kelompok *hard rocks* yang dianggap sebagai kelompok garapan yang sulit karena rendahnya motivasi dan minat mereka untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara; 3) Alokasi anggaran untuk penuntasan pemberantasan buta aksara dari APBN pusat belum cukup memadai sehingga sasaran yang harus dilayani belum tergarap secara menyeluruh.

1.2. Tujuan Khusus

Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

- 1) Menyusun strategi pelaksanaan bintek, yang mencakup kiat-kiat dalam pelaksanaan bintek;
- 2) Menemukan pendekatan yang akan digunakan pada keaksaraan fungsional, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
- 3) Tersusunnya bentuk dan model pelaksanaan Bintek dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat, sehingga penuntasan buta aksara dapat terhapuskan;

1.3. Urgensi (keutamaan) Penelitian

BPS NTB mencatat bahwa sebanyak 615.823 orang atau sekitar 21,21% jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menyandang buta aksara . Di mana Kabupaten Lombok tengah merupakan daerah yang paling banyak jumlah penduduk buta aksara, yakni sekitar 179.946 orang (39%), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 142.376 orang (20,79%), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 142.476 orang (20,79%), Kabupaten Bima sebanyak 37.965 orang , Kabupaten Sumbawa 28.944 orang, Kabupaten Dompu 30.923 orang, Kota Mataram 32.616 orang dan kota Bima 8.470 orang . Sedang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan daerah paling sedikit penduduk buta aksara yakni sekitar 6.098 orang (9,39%). Menurut Martinus tingginya angka buta aksara di NTB disebabkan empat faktor: 1) kurangnya fasilitas pembelajaran di masyarakat, sehingga anak-anak yang semestinya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menjadi terhambat, 2) tingginya angka dropout siswa, 3) faktor kemiskinan dan 4) budaya masyarakat. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah angka buta aksara di NTB dengan klasifikasi 15 tahun ke atas, penduduk perempuan jumlahnya lebih tinggi, yakni 410.989 orang (26,45%) dan penduduk laki-laki sebanyak 204.834 orang (15,18%) (Martinus, 2007).

Memperhatikan berbagai persoalan yang diutarakan di atas ternyata program pemberantasan buta aksara yang selama ini dilakukan belum memperoleh prioritas yang

tinggi dalam pembangunan nasional, sehingga jumlah sasaran maupun anggaran yang dialokasikan untuk pemberantasan buta aksara kurang memadai. Di samping itu, pendekatan atau cara pemberantasan buta aksara hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang konvensional. Akibatnya jumlah buta aksara dari satu dekade ke dekade berikutnya cenderung tidak menurun secara signifikan.

Kegagalan ini banyak diakibatkan karena apa yang dilakukan selama ini tidak terencana dengan tepat, tidak terprogram dan tidak terevaluasi dengan baik yang berakibat pada tidak tepatnya sasaran yang akan diharapkan. Melalui program yang kami usulkan ini akan bisa menjawab dan memecahkan persoalan itu dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, seperti yang tertera pada halaman mengenai Skenario Pelaksanaan Bintek yang menawarkan model baru pelaksanaan bintek, dan Rincian Sasaran Bintek yang lebih akomodatif dan Monev yang lebih rinci yang dapat menggali persoalan lapangan karena menggunakan metode triangulasi yang terbaru, baik pada teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

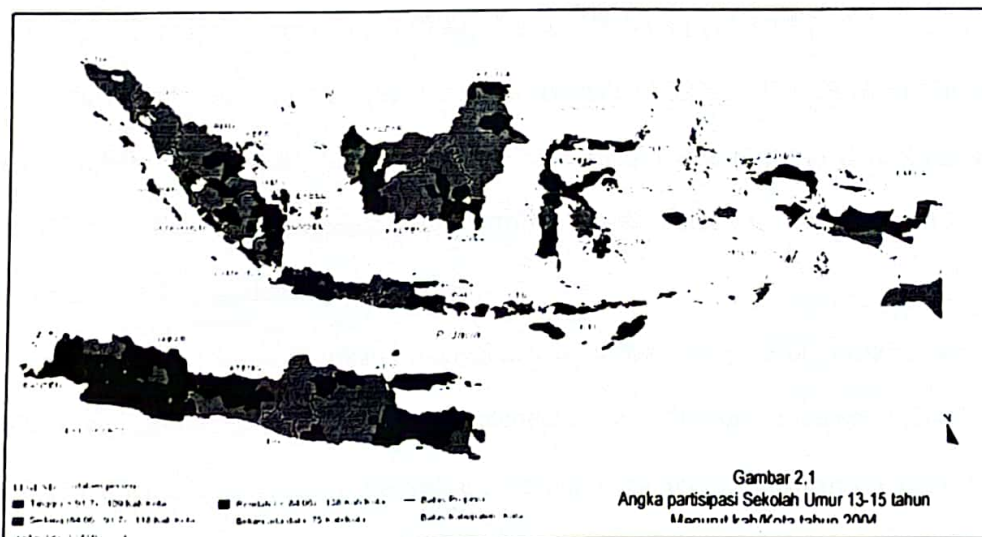
Dengan demikian, program ini tidak hanya mengkaji tentang bagaimana dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2009, tapi yang lebih utama dan penting adalah penerapan sebuah strategi dan model bimbingan teknik baru dan inovatif yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tingkat implementasi atau tataran praktis.

BAB II

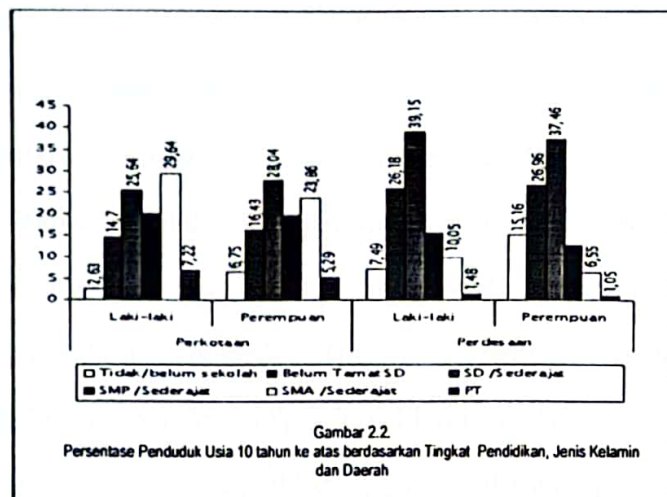
STUDI PUSTAKA

Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan non formal.

Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terjadi mulai dari pendidikan anak usia dini. Data BPS dan Depdiknas tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 28,5 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,2 juta (25,3 %) yang memperoleh layanan pendidikan dan perawatan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Secara spasial, angka partisipasi sekolah umur 13 – 15 tahun pada tahun 2004 disajikan dalam Gambar 2.1 yang menunjukkan sekitar 40% (176 kabupaten/kota) memiliki angka partisipasi yang rendah.



Dilihat dari jenis kelamin, persentase perempuan yang berpendidikan rendah (SD dan SMP) relatif lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun, persentase perempuan berpendidikan menengah dan tinggi lebih rendah dibanding laki-laki (lihat Gambar 2.2).



Gambar 2.2
Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah

Angka putus sekolah secara absolut masih cukup tinggi, meskipun persentasenya terus menurun dari 3,1% pada tahun 1995/1996 menjadi 2,4% pada tahun 2004/2005 untuk jenjang SD/MI, dan dari 3,8% menjadi 2,6% untuk jenjang SMP/MTs. Berdasarkan data Susenas 2004, sepuluh provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi pada kelompok usia 13-15 tahun, meliputi Provinsi Gorontalo (15,87%), Bangka Belitung (10,420%), Sulawesi Selatan (9,72%), Nusa Tenggara Barat (9,69), Sulawesi Tengah (9,39%), NTT (9,16%), Sulawesi Tenggara (8,84%), Sulawesi Utara (8,79%), Kalimantan Barat (7,77%) dan Kalimantan Selatan (7,35%). Sementara provinsi yang memiliki angka putus sekolah usia 13-15 tahun terendah adalah DI Yogyakarta sebesar 0,88%.

Tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan menjadi terbatas. Sesuai dengan ketentuan, biaya SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus membayar berbagai iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, pakaian seragam, sepatu

seragam, biaya transportasi, dan uang saku. Berbagai iuran tersebut menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.

Masalah lain yang dialami oleh siswa SD/MI terutama di daerah perdesaan adalah kekurangan kalori dan kekurangan gizi yang mengakibatkan rendahnya daya tahan belajar dan semangat belajar siswa. Dalam jangka panjang, hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan anak untuk putus belajar, mengulang kelas dan tidak mau sekolah.

Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam partisipasi pendidikan baik diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM).

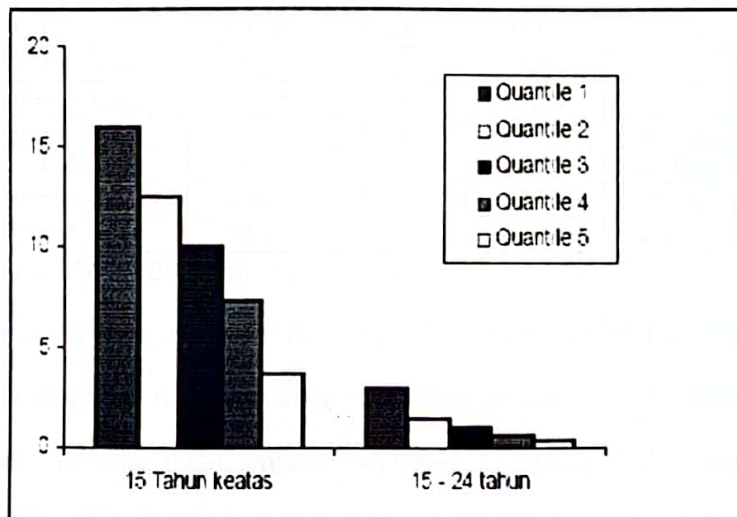
Masalah kesenjangan akses pendidikan juga terjadi antara penduduk perdesaan dan perkotaan dan antarwilayah. Penduduk perdesaan yang berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan sekolah menengah dan perguruan tinggi hanya 9,6% jauh lebih rendah dari penduduk perkotaan (33,0%). Selain itu, partisipasi pendidikan masyarakat perdesaan juga lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan. Data SUSENAS 2004 menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi dalam APK. APK jenjang SMP/MTs di NTT hanya sekitar 63,4%, DI Yogyakarta sekitar 97,3%. Sementara, APK jenjang SMA/SMK di Gorontalo hanya sekitar 37,9%, dan DKI Jakarta sekitar 77,63%.

Perbedaan akses pendidikan juga terjadi antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi pendidikan perempuan terus meningkat, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA dan perguruan tinggi) angka partisipasi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki (lihat Gambar 3.8). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang dapat menikmati jenjang pendidikan tinggi ternyata lebih sedikit. Masalah ini perlu diatasi karena perempuan yang lebih berpendidikan akan memberikan sumbangan yang lebih baik bagi perbaikan kesejahteraan generasi muda dan pemutusan proses pewarisan kemiskinan.

Masyarakat miskin juga menghadapi masalah persebaran SLTP/MTs yang tidak merata terutama di daerah perdesaan. Hal ini menyebabkan pendidikan nonformal menjadi alternatif bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak sekolah, buta huruf, dan orang dewasa yang menganggur. Saat ini perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat masih sangat kurang.

Rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan tingginya angka buta aksara. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara sekitar 9,62% dengan rasio angka buta aksara kelompok berpengeluaran terendah (Q1) lebih tinggi dibanding kelompok pengeluaran tinggi (lihat Gambar 2.3).

Gambar 2.3.
Angka Buta Aksara Menurut Kelompok Usia dan Pengeluaran Tahun 2004



Dilihat dari jenis kelamin, angka melek aksara perempuan lebih rendah dibanding laki-laki untuk semua kelompok usia baik di perkotaan maupun di perdesaan (lihat Tabel 3.2). Pada tahun 2004, perempuan usia 10 tahun ke atas di perdesaan yang tidak/belum bersekolah sekitar 14,27% lebih tinggi dibanding laki-laki (6,86%). Di daerah perkotaan, perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah sekitar 6,6% sedangkan laki-laki sekitar

2,4%. Perempuan yang tidak tamat SD/MI di pedesaan 26,34% dan di perkotaan 16,69%, sementara laki-laki yang tidak tamat SD/MI 25,32% di pedesaan dan 15,08% di perkotaan. Alasan perempuan tidak menamatkan atau tidak melanjutkan sekolah antara lain masih kuatnya budaya kawin muda di pedesaan, anggapan bahwa sekolah tidak akan bermanfaat bagi perempuan karena pada akhirnya mereka tidak akan bekerja dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumahtangganya. Di samping itu, jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah menjadi penyebab lebih rendahnya partisipasi pendidikan perempuan dibanding laki-laki. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.1) berikut.

Tabel 2.1. Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2004

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin		Kelompok Umur			
		15 tahun ke atas	15 – 24 tahun	25-44 tahun	45 tahun ke atas
Perkotaan	Laki-laki	97,17	99,47	98,86	92,10
	Perempuan	92,19	99,39	97,16	76,24
	L + P	94,64	99,43	97,99	84,16
Pedesaan	Laki-laki	91,56	98,36	95,83	79,98
	Perempuan	82,47	97,77	91,21	57,77
	L + P	87,00	98,07	93,47	68,85
K + D	Laki-laki	94,04	98,87	97,20	84,95
	Perempuan	86,80	98,54	93,90	65,34
	L + P	90,38	98,71	95,51	75,13

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2004 BPS

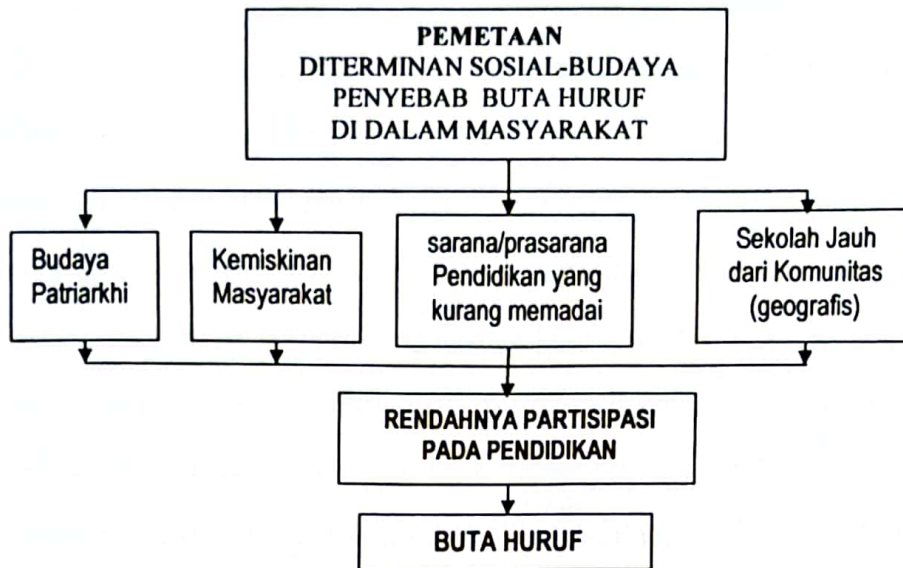
Masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah rendahnya mutu pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kurangnya ketersediaan guru baik dari jumlah maupun mutu terutama di beberapa daerah. Pada tahun ajaran 2004/2005 rasio siswa per guru untuk jenjang pendidikan SD adalah 20 orang, MI 16 orang, SMP 22 orang, MTs 11 orang, SM (SMA dan SMK) 20 orang dan MA 9 orang. Sampai dengan tahun 2003 masih banyak guru yang belum memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan minimal lulus Diploma II untuk SD/MI/SDLB/Paket A, minimal lulus Diploma III untuk jenjang SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, dan pendidikan sarjana atau lebih untuk jenjang

SMA/SMK/MA. Guru SD/MI yang memenuhi persyaratan rata-rata hanya 33,8%, dan guru SLTP rata-rata hanya 48,3%.

Kemampuan layanan pendidikan bagi anak dengan kemampuan berbeda (diffable) terutama dari keluarga miskin masih lebih kecil dibanding jumlah anak yang memerlukan pelayanan. Mereka umumnya menjadi beban ekonomi keluarga miskin. Pada tahun 2003/2004 jumlah anak dengan kemampuan berbeda usia 7-15 tahun sekitar 1,5 juta anak. Dari jumlah tersebut sekitar 3,4% atau 51.291 anak yang memperoleh layanan pendidikan melalui SDLB dan SMPLB A,B,C,D,D1,E,G dan autis. Anak dengan kemampuan berbeda dari keluarga miskin masih dipandang sebagai beban dan yang harus dikasihani sehingga membuat hak-hak dasarnya terabaikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah khusus dan dukungan politik yang kuat agar separuh dari jumlah anak dengan kemampuan berbeda tersebut dapat menikmati pendidikan dasar.

Berbagai masalah dalam layanan pendidikan menyiratkan perlunya peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan seperti penurunan beban biaya pendidikan, peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, penambahan jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, dan peningkatan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar.

Gambaran hambatan sosial budaya dan faktor lain yang menyebabkan tingginya angka buta huruf di pulau Lombok dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :



Diterminan sekolah yang jauh dari komunitas sebagai faktor penghambat partisipasi di dalam dunia pendidikan ada hubungannya dengan tingkat kesulitan dari peserta didik untuk menjangkau lokasi persekolahan. Di pulau Lombok misalnya, pada jenjang Pendidikan Dasar ada 65 lokasi yang masih sulit di akses oleh peserta didik untuk bersekolah, di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 59 lokasi, dan di jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA) sebanyak 28 lokasi yang masih sulit dijangkau oleh peserta didik. (Dikpora NTB, 2007).

Pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Pulau Lombok terdapat kesenjangan partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. Pada sekolah dasar anak laki-laki sebanyak 33.723 orang, dan anak perempuan 28.590 orang. Pada jenjang pendidikan SMP anak laki-laki sebanyak 28.510 sedangkan anak perempuan sebanyak 24.635 orang. Sedangkan, pada jenjang Sekolah Menengah Atas anak laki-laki sebanyak 17.990 orang, sementara anak perempuan hanya 15.170 orang (Dikpora NTB, 2007)

Demikian juga data tentang buta huruf atau yang tidak/belum pernah sekolah. Penduduk umur 7-10 tahun jumlah yang tidak/belum pernah sekolah di Pulau Lombok

sebanyak 8,3% persen, sedang umur di atas 10 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 39,4 % persen anak usia persekolahan. Sedangkan, data tentang perentase penduduk usia 10-44 menurut kemampuan baca tulis di Pulau Lombok, masih ada 27,2 % penduduk yang masih buta huruf (BPS NTB, 2007).

Hasil kajian Syafruddin (2009) juga menemukan bahwa hambatan faktor kemiskinan masyarakat merupakan faktor dominan yang menyebabkan orang tua tidak bisa atau tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Data hasil survey dalam penelitian ini, sekitar 58 % orang tua yang diwawancara memberikan alasan, bahwa karena kemiskinan yang mereka alami sehingga anak-anak tidak disekolahkan. Faktor kemiskinan dari orang tua terkait pula dengan kondisi orang tua sebagai subyek penelitian, dimana sekitar 64 % orang tua bekerja sebagai petani miskin, dan pendidikan dari orang tua sebagai subyek penelitian, sekitar 53 % tidak tamat sekolah dasar atau tidak sekolah. Hal ini membuat mereka tidak dapat mengakses pekerjaan dan pengetahuan yang memadai untuk meningkatkan hasil pertanian, karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai. Selain itu, dengan jumlah anak yang dimiliki oleh subyek penelitian rata-rata 5 orang anak pada setiap keluarga juga menambah beban keluarga, dan berpengaruh pada minimnya alokasi dan distribusi sumber-sumber yang ada di dalam keluarga. Pendapatan yang mereka peroleh dari hasil pertanian misalnya, hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaniah saja, sedangkan yang lain tidak dapat terpenuhi seperti untuk pendidikan pada anak-anak mereka.

TABLA

CONTENIDO DE LA TERCERA PARTE

CONTENIDO DE LA TERCERA PARTE

El presente libro, que constituye el tercer tomo de la obra, trata de los aspectos más importantes de la vida social y económica de la América Latina durante el siglo XIX. En él se analizan las transformaciones que se produjeron en este período, desde la independencia hasta la consolidación de los Estados nacionales. Se abordan temas como el comercio exterior, la industria, el transporte, la agricultura y el desarrollo urbano. El autor destaca el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano. El autor destaca el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano.

En el capítulo II se estudia el comercio exterior de América Latina durante el siglo XIX. Se analiza el papel del comercio exterior en el crecimiento económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano. El autor destaca el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano.

En el capítulo III se estudia la industria de América Latina durante el siglo XIX. Se analiza el papel de la industria en el desarrollo económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano. El autor destaca el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento económico de la región, así como el impacto de la revolución industrial en Europa en el desarrollo de América Latina. También se menciona el surgimiento de las primeras industrias y el transporte, así como el papel de la agricultura y el desarrollo urbano.

En el capítulo IV se estudia el transporte de América Latina durante el siglo XIX.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN TAHAPAN SKENARIO KEGIATAN

3.1 Skenario Pelaksanaan Bintek

Bimbingan teknis (Bintek) program pendidikan keaksaraan adalah upaya menemukan hambatan dan memberikan bimbingan perbaikan dalam upaya peningkatan jumlah warga belajar yang berhasil mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) serta pengaruhnya terhadap peningkatan sosial-ekonomi warga belajar yang bersangkutan. Untuk mewujudkannya, skenario pelaksanaan Bintek didasarkan pada dua hal pokok, yaitu tahapan Bintek dan formulasi cara kerja Bintek. Tahapan Bintek merupakan skenario keseluruhan Bintek sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan keaksaraan. Formulasi cara kerja Bintek merupakan bagian dari tahapan Bintek yang dirinci secara khusus, sehingga nampak adanya cara kerja Bintek sampai menemukan model yang tepat untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan.

Tahapan Bintek terdiri dari: Survei Lapangan; Identifikasi, Pengolahan, dan Analisis Data; Penetapan Program; Penyamaan Persepsi Tim Bintek; Implementasi Program (Pelaksanaan Bintek); Evaluasi Implementasi Program Bintek; dan Revisi dan Penetapan Model Akhir Implementasi Program. *Formulasi cara kerja Bintek* terdiri dari: penyamaan persepsi tim Bintek, pengenalan obyek dan subyek pendidikan keaksaraan, analisis dan penetapan model pendidikan keaksaraan, implemntasi dan pendampingan terhadap subyek dan obyek pendidikan keaksaraan, penemuan model akhir pendidikan keaksaraan.

Survey lapangan merupakan tahapan awal sebagai dasar pelaksanaan Bintek. Melalui kegiatan ini dilakukan aktivitas Pendataan efektivitas Program Sukma 1, 2, dan 3 serta Paket A, B, dan C dan Pendataan hasil implementasi program. Hasil yang ingin dicapai berupa Data dasar pengelola dan sistem pengelolaan Program Sukma 1, 2, dan 3 serta Paket

A, B, dan C selama ini. Data-data yang diperoleh, selanjutnya diidentifikasi, diolah, dan dianalisis. Beberapa aktivitas yang dilakukan, meliputi Klasifikasi Data, Kodifikasi Data, Analisis Data, Triangulasi Data, dan Verifikasi Data. Melalui aktivitas tersebut, hasil yang ingin dicapai berupa: Data performance pengelola program; Data efektivitas, efisiensi, dan hasil Program Sukma 1, 2, dan 3 serta Paket A, B, dan C selama ini; dan Rancangan (kemungkinan) model baru berdasarkan hasil implementasi model selama ini.

Setelah diperoleh gambaran model penyelenggaraan pendidikan keaksaraan selama ini atau bahkan kemungkinan diperoleh ide baru berupa rancangan model yang bersifat memperbaiki model yang sudah ada, maka dilakukan tahapan Penetapan Program. Terdapat dua aktivitas utama yaitu Pembahasan Rancangan Model dan Penetapan Model Terpakai (Uji Coba). Hasil yang akan diperoleh pada tahapan ini berupa kemungkinan model baru yang diterapkan untuk uji coba. Tim Bintek yang ada sebelum melakukan aktivitas bimbingan teknis terlebih dulu membahas secara tuntas temuan model tersebut. Melalui pembahasan bersama dalam tim akan diperoleh kesepakatan seluruh anggota tim, sehingga nantinya akan meminimalisir perbedaan persepsi antar anggota tim terhadap rancangan model.

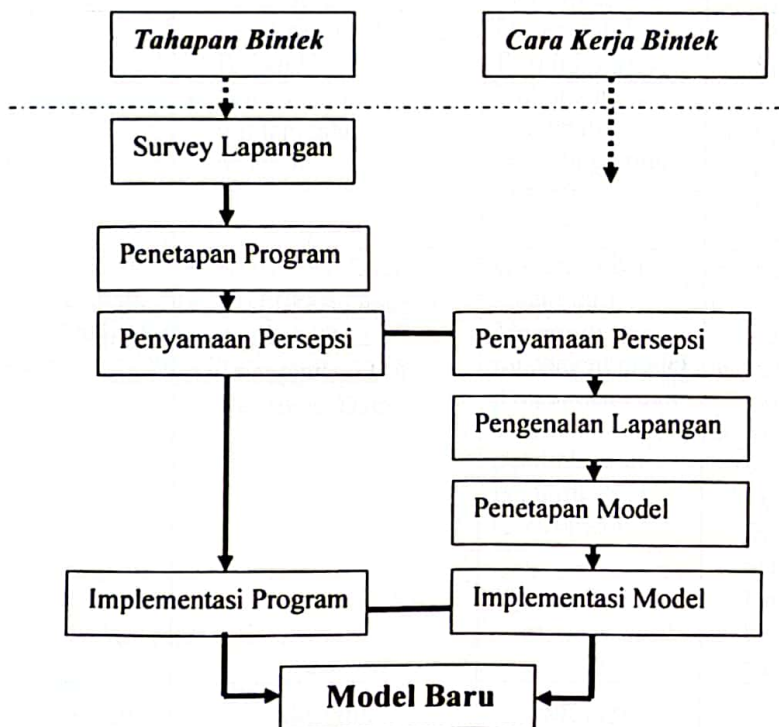
Setelah diperoleh kesepakatan dalam rancangan model penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, seluruh Tim Bintek mengimplementasikannya di lapangan dalam bentuk proses bimbingan teknis selama jangka waktu tertentu. Saat implementasi model, Tim Bintek sekaligus juga mencatat seluruh kelebihan maupun kekurangan yang mungkin terjadi, serta sejauhmana tingkat efektifitas maupun efisiensi implementasi model. Data yang diperoleh dari aktivitas ini digunakan sebagai bahan kegiatan Evaluasi Implementasi Program Bintek.

Beberapa aktivitas yang dilakukan selama proses Evaluasi Implementasi Program Bintek, meliputi: Pembahasan hasil implementasi program Bintek; Konfirmasi hasil berdasarkan indikator program Bintek; dan Kemungkinan pengembangan program Bintek. Data akhir yang ingin diperoleh berupa Data hasil implementasi Program (Pelaksanaan

Bintek). Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk pembahasan tahapan akhir Bintek yaitu Revisi dan Penetapan Model Akhir Implementasi Program. Aktivitas yang akan dilakukan adalah Pembahasan model hasil evaluasi implemntasi program Bintek dan Penetapan Model akhir implementasi program. Melalui aktivitas terakhir pada tahapan akhir ini akan diperoleh Model hasil evaluasi implemntasi program Bintek . Model ini nantinya akan digunakan sebagai dasar yang tepat penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Secara skematik sekenario tahapan bintek dan formulasi bintek sebagai berikut :

Skenario Pelaksanaan Bintek



3.2 Sasaran Bintek

Kegiatan Bintek dan ini direncanakan dapat terlaksana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari 7 kabupaten dan 2 kota. Pada implementasinya akan dipilih dengan teknik purposive random sampling di setiap kabupaten kota. Masing-masing populasi (kabupaten/kota) dikelompokkan menjadi 3 bagian (kategori): baik, sedang, dan

kurang. Di setiap kategori dipilih 2 pengelola pendidikan keaksaraan. Dengan demikian secara keseluruhan diperoleh 42 buah pengelola pendidikan keaksaraan. Dari keseluruhan sampel yang ada dan seluruh pihak terkait program ini, maka rincian sasaran Bintek dijabarkan sebagai berikut:

Gambaran rinci sasaran Bintek terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Bintek

No	Tahapan	Aktivitas	Metode	Sasaran
1.	Survei Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan efektivitas Program Sukma 1, 2, dan 3 serta Paket A, B, dan C • Pendataan hasil implementasi program. 	Pendekatan Etik dan Emik, Observasi, In Depth Interview, Dokumentasi Snowball Sampling untuk Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola (Subyek) • Masyarakat Sekitar (Pemegang Otoritas Setempat: Kadus, Toma, Toga) • Sistem Pengelolaan (Program): Manajemen Pengelolaan dan KBM Getas Aksara
2.	Identifikasi, Pengolahan, dan Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi Data • Kodifikasi Data • Analisis Data • Trianggulasi Data • Verifikasi Data 	Kualitatif dan Kuantitatif Menemukan rancangan model pengelolaan dan sistem pembelajaran Pendidikan Keaksaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Getas Aksara di masing-masing Kabupaten/Kota • Pelaksana program dan pengelolaannya. • Model pembelajaran yang diterapkan (waktu, peserta, tutor, frekuensi, biaya, KBM, evaluasi, dan tindak lanjut). • Kemungkinan model baru yang diterapkan.
No	Tahapan	Aktivitas	Metode	Sasaran
3.	Penetapan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rancangan Model • Penetapan Model Terpakai (Uji Coba) 	Workshop	Kemungkinan model baru yang diterapkan untuk uji coba.
4.	Penyamaan Persepsi Tim Bintek	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan penyamaan persepsi Tim Bintek. • Pembagian tugas Tim Bintek. 	Workshop	Panitia, Nara Sumber Bintek
5.	Implementasi Program	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi program Bintek 	Observasi (Site Visit),	Panitia Nara Sumber Bintek

	(Pelaksanaan BinteK)	berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dan dukungan pelaksanaan program BinteK. 	Pendampingan	
6.	Evaluasi Implementasi Program BinteK	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan hasil implemntasi program BinteK. • Konfirmasi hasil berdasarkan indikator program BinteK. • Kemungkinan pengembangan program BinteK. 	Kualitatif dan Kauntitatif	Data hasil implementasi Program (Pelaksanaan BinteK)
7.	Revisi dan Penetapan Model Akhir Implementasi Program	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan model hasil evaluasi implemntasi program BinteK. • Penetapan Model akhir implementasi program. 	Kualitatif dan Kuantitatif	Model hasil evaluasi implemntasi program BinteK

3.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan BinteK

Program BinteK dan Monev pada pendidikan keaksaraan dilaksanakan di 42 buah lembaga pengelola pendidikan keaksaraan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi NTB. Waktu kegiatan ini direncanakan selama 5 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2008.

3.4 Instrumen BinteK

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini dikelompokan menjadi dua kelompok berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu : (1) Instrumen yang digunakan pada tahap survey lapangan; dan (2) Instrumen yang digunakan pada saat impelmentasi program atau monev. Tetapi sesungguhnya nama alat yang digunakan baik pada saat survey lapangan maupun pada pelaksanaan program hampir sama, hanya saja hal yang digali atau indikator yang digali dan sasaran atau subyeknya bisa jadi sama atau berbeda. Secara garis

besarnya metode dan instrumen atau alat yang digunakan dan indikator yang akan digali dengan masing-masing alat dapat dilihat pada matrik berikut ini.

Matrik Metode dan Instrumen Bintek

Tahapan	Sasaran	Metode	Instrumen	Indikator yang Digali/Hal yang Dicermat (Acuan Kepelaksanaan)
Survey Lapangan	Pengelola	FGD	Pedoman Diskusi Terarah	Sistem rekrutmen pengelola: <ul style="list-style-type: none"> • Cara penentuan pengelola. • Syarat pengelola. Sistem pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan. • Tugas dan tanggung jawab masing pihak yang terlibat. • Penerapan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. • Hambatan dan kelebihan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. • Solusi yang pernah ditempuh dan dampak dari solusi yang diterapkan. Hasil implementasi: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak terhadap kehidupan ekonomi warga belajar. • Peningkatan atau keberhasilan dalam belajar. • Dampak penerapan bagi masyarakat.
		Dokumentasi	Daftar Isian, Matrik Isian Data, Daftar Dokumen yang Dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengelola. • Struktur pengelola dan job diskripsinya. • Kurikulum dan kelengkapannya. • Jumlah warga belajar beserta identitasnya. • Laporan kegiatan • Administrasi kegiatan belajar.
Tahapan	Sasaran	Metode	Instrumen	Indikator yang Digali/Hal yang Dicermat (Acuan Kepelaksanaan)
		Wawancara	Pedoman Wawancara	Sistem pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan. • Tugas dan tanggung jawab masing pihak yang terlibat. • Penerapan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. • Hambatan dan kelebihan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. • Solusi yang pernah ditempuh dan dampak dari slusi yang diterapkan. Hasil implementasi: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak terhadap kehidupan ekonomi warga belajar. • Peningkatan atau keberhasilan dalam belajar.

				<ul style="list-style-type: none"> • Dampak penerapan lebih luas kepada masyarakat.
	Warga Belajar	FGD	Pedoman PGD	<ul style="list-style-type: none"> • Cara rekrutmen warga belajar. • Waktu dan jadwal pembelajaran. • Manfaat pembelajaran terhadap pengetahuan, keterampilan dan kegiatan ekonomi dan lainnya. • Sistem pembelajaran. • Kendala dan hambatan yang dihadapi. • Pamong belajar dalam pengelolaan pembelajaran. • Sistem pembelajaran yang diharapkan. • Sistem pengelolaan yang diterapkan (kelebihan dan kekurangan, serta harapannya).
		Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Cara rekrutmen warga belajar. • Waktu dan jadwal pembelajaran. • Manfaat pembelajaran terhadap pengetahuan, keterampilan dan kegiatan ekonomi dan lainnya. • Sistem pembelajaran yang diterima. • Kendala dan hambatan yang dihadapi. • Pamong belajar dalam pengelolaan pembelajaran • Sistem pembelajaran yang diharapkan. • Sistem pengelolaan yang diterapkan (kelebihan dan kekurangan, serta harapannya).
	Pamong Belajar	Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan pamong belajar. • Pembinaan dan pengembangan pamong belajar. • Penghargaan terhadap pamong belajar oleh pengelola. • Metode dan cara dalam pembelajaran. • Kendala yang dihadapi berkaitan dengan warga belajar. • Solusi yang pernah dilakukan serta dampaknya. • Hal yang dilakukan dalam tahapan pembelajaran. • Monev dan pengembangan terhadap kinerja pamong. • Pembinaan dan pengembangan yang diharapkan.
		Dokumen-tasi	Daftar Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat pembelajaran • Hasil evaluasi pembelajaran. • Instrumen evaluasi. • Daftar bahan bacaan dan media yang digunakan dalam pembelajaran
	Kasub	Wawancara	Pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan lembaga yang memperoleh

	PLS dan Bidang Keaksaraan		Wawancara	<p>bantuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pemberian bantuan. • Sistem pengelolaan yang diharapkan terhadap lembaga yang memperoleh bantuan. • Sistem pembinaan yang dilakukan. • Waktu dan jadwal pembinaan dan monev penyelenggaraan. • Sistem pelaporan kegiatan penyelenggaraan. • Kendala dan bentuk dukungan yang diperoleh dalam pengembangan keaksaraan.
	Pengawas	Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengawasan dan penentuan pengawas. • Jadwal dan waktu pengawasan. • Sistem pembinaan dan pengembangan pamong. • Kendala pembinaan pamong. • Solusi yang pernah dilakukan dan dampaknya. • Sistem pelaporan pembinaan.
		Dokumentasi	Daftar Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan hasil pembinaan. • Jadwal pembinaan. • Contoh rancangan pembinaan.
Monev dan Bintek	Pengelola	Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator capaian kegiatan untuk masing-masing tahap. • Indikator pengelolaan • Indikator penentuan pamong, dan warga belajar.

Tahapan	Sasaran	Metode	Instrumen	Indikator yang Digali/Hal yang Dicermat (Acuan Kepelaksanaan)
	Pelaksana Bintek	Observasi	Pedoman Pengamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator tahapan pembinaan. • Indikator capaian pembinaan.
		Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi. • Indikator yang telah dan belum dicapai. • Tahapan pembinaan yang telah an belum dilakukan.
	Pamong	Pengamatan	Pedoman Pengamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Inikator tahapan pembelajaran. • Indikator model kegiatan pembelajaran. • Indikator capaian atau target capaian.
		Wawancara	Pedoman Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi • Solusi yang dilakukan. • Indikator atau target yang tela dan belum dicapai.
	Warga Belajar	PGD	Pedoman PGD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembelajaran

				<ul style="list-style-type: none">• Dampak pembelajaran terhadap kemampuan dan perekonomian keluarga.
--	--	--	--	---

Kegiatan penelitian ini diawali dengan kegiatan penjajagan ke lapangan dan penyusunan instrumen peneitian. Penjajagan ke lapangan dilakukan dengan mendatangi SKB-SKB kabupaten dan kota untuk menentukan lokasi penelitian. Target kegiatan ini adalah memperoleh data tentang PKBM/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dan kegiatannya berkesinambungan. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan bulan Juni. Dari hasil penjajagan tersebut, ternyata Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram, pelaksanaan Program Penuntasan Keaksaraannya belum berjalan aktif karena masih menghadapi berbagai persoalan, diantaranya adalah belum turunnya dana pendukung dari pemerintah. Pelaksanaan Program Penuntasan Keaksaraan yang aktif saat ini adalah Kecamatan Jeroaru Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah bersifat bimbingan teknis (Bintek), oleh karenanya penelitian ini terutama difokuskan ke Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang sampai saat ini pelaksanaan Program Penuntasan Keaksaraannya masih aktif dan berkelanjutan.

THE HISTORY OF THE NATION

CHAPTER I

The history of the nation is a story of the people who have lived on this land. It is a story of the struggles and triumphs of a people who have fought for their freedom and their rights.

The first settlers of this land were the Native Americans. They were a people of many tribes, each with its own customs and traditions. They lived in harmony with nature and were skilled hunters and farmers.

The first European settlers came to this land in the early 17th century. They were seeking a new home and a better life. They brought with them the tools and skills of their European ancestors.

The early settlers of this land were the Pilgrims. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

The Pilgrims were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life. They arrived on the shores of this land in 1620. They were a group of people who had fled their homes in Europe in search of a better life.

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

Di dalam bab hasil penelitian ini diawali dengan penyajian data penelitian yang dapat diakses sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun data yang disajikan berikut ini masing-masing : (1) data umum Program Getas Aksara di Pulau Lombok; (2) data Pamong Belajar sebagai responden; (3) data warga belajar sebagai subjek penelitian.

4.1 Data Umum Program Getas Aksara Di Pulau Lombok

Data tentang program Getas Aksara di masing-masing Kabupaten/Kota Di Pulau Lombok disajikan dalam tabel berikut :

1. Kota Mataram

Tabel 01 : Data Tentang Jumlah Kelompok dan Warga Belajar Berdasarkan Lembaga Penyelenggara dan Kecamatan di Kota Mataram

No.	Kecamatan	Lembaga/PKBM Penyelenggara	Jumlah Kelompok Belajar	Jumlah Warga Belajar	Jml. /Kecamatan	(%) /Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mataram	PKBM Darul Hikmah	12	176	1659	33,01
		PKBM Damai	7	104		
		PKBM Dewi Anjani	14	214		
		PKBM Terampil	16	234		
		PKBM Nanda	14	208		
		Yayasan Agniya	8	123		
		DPD KNPI Kota Mataram	20	305		
		Forum Kota Sehat	11	162		
		Yayasan Islam Bina'ul Ummah	9	133		
		2	Ampenan	PKBM Sinar Harapan		
PKBM Nurhidayah	2			21		
PKBM Sintung	3			39		
PKBM Mina Nurul Jannah	3			40		
PKBM Matahari Terbit	28			420		
PKBM AI – Hidayah	10			158		
PKBM Sumber Daya Raudah	6			94		
PKBM Aneka Wangsa	5			81		
PKBM AI – Kautsar	8			122		
PKBM Melati	9			138		
		DPD BKPRMI	14	210		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Cakranegara	PKBM Widya Dharma	5	81		
		PKBM Amal Bhakti	19	280		

	PKBM Pjar	6	95	1804	35,89
	PKBM Hajrahtulrasul	16	239		
	PKBM AI – Qadar	15	223		
	PKBM Pandawa	5	79		
	PKBM Siwandana	3	50		
	PKBM Kelurahan Sapta Marga	3	40		
	PKBM AI – Ikhias	17	229		
	PKBM Peduli Bangsa	8	120		
	PKBM Handayani	24	368		
Total		336	5.026	5.026	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB
Tahun Anggaran 2007

2. Kabupaten Lombok Barat

Tabel 02 : Data Tentang Jumlah Kelompok dan Warga Belajar Berdasarkan Lembaga Penyelenggara dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No.	Kecamatan	Lembaga/PKBM Penyelenggara	Jumlah Kelompok Belajar	Jumlah Warga Belajar	Jml. /Kecamatan	(%) /Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanjung	PKBM Sigar Penjalin	97	1.457	1.956	4,15
		PKBM Mekar Sari	33	499		
2	Batulayar	PKBM Tunas Bangsa	52	787	3805	8,07
		PKBM Assyafi'i	48	720		
		PKBM Nyiur Hijau	70	900		
		PKBM Embun Pagi	24	367		
		PKBM Tanjung Bias	23	347		
		PKBM Bina Awal	23	350		
		PKBM Nurul Iman	30	334		
3	Bayan	PKBM Teruna Asih	31	464	4057	8,60
		PKBM Petung Bayan	47	700		
		PKBM Bina Bangsa Bayan	109	1.465		
		PKBM Arus Aras	8	120		
		PKBM Sinar Rinjani	14	208		
		PKBM Tunggal Kayun	7	100		
		PKBM Gading Datu	40	600		
		PKBM Tunar Mekar	20	300		
4	Gangga	PKBM AI – Hidayah	41	610	1996	4,23
		PKBM Mulan Semu	31	470		
		PKBM Ta'limushiyan	22	330		
		PKBM Jati Suara	39	586		
5	Gerung	PKBM Tunas Harapan	16	237	1888	4,00
		PKBM AI – Firdaus	18	267		
		PKBM Aini	40	600		
		PKBM AI – Muslimun	8	114		
		PKBM Sekar angi Salamatul Insan	18	270		
		PKBM Maju Bersama	27	400		

6	Gunungsari	PKBM Arroziqin	23	350	7265	15,40
		PKBM Al – Quraba	32	478		
		PKBM Amanah	31	465		
		PKBM Amanah Bunda	37	555		
		PKBM Bukit Barisan	49	735		
		PKBM Al – Hijrah	14	206		
		PKBM Ad – Dinulqoyyim	13	195		
		PKBM Al – Ihsan	37	555		
		PKBM Halimatus – Sa'diyah	11	170		
		PKBM Ukhuwah	81	1.215		
		PKBM Bina Putra	18	270		
		PKBM Darul Makumur	23	351		
		PKBM Bina Generasi	100	1.200		
		Yayasan Ponpes Al – Tahzib	30	450		
		SKB Lombok Barat	7	70		
		7	Kayangan	PKBM Merenten		
PKBM Ardi Putra	63			800		
PKBM Panggung Perdana	85			1.096		
PKBM Daya Gunung	13			201		
PKBM Bina Anak Bangsa	20			300		
PKBM Gumana	51			767		
PKBM Harapan Maju	21			309		
PKBM STC	56			847		
8	Kediri	PKBM Darul Yaqin	11	165	2761	5,85
		PKBM Nurul Huda	18	267		
		PKBM Al – Husna	12	180		
		PKBM Al – Kautsar	24	357		
		PKBM Ikhtiar Bersama	15	230		
		PKBM Mustafa Ibrahim	10	150		
		PKBM Ats – Saqofy	25	370		
		PKBM Ar – Rahman	6	90		
		PKBM Tunas Bangsa	7	100		
		PKBM Baru Mekar	18	274		
		PKBM Bhakti Umat	15	228		
		PKBM Mulia Jaya	23	350		
		9	Kuripan	PKBM Makna Sejahtera		
PKBM Guna Urip	58			870		
PKBM Tunas Aksara	35			529		
10	Labuapi	PKBM Muhyil Falah	50	748	3529	7,48
		PKBM As – Suhada	30	452		
		PKBM Al – Akhyar	47	705		
		PKBM Al – Hamdani	27	405		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PKBM Tunas Harapan	48	719		
		PKBM Darun Najah	33	500		
11	Lembar	PKBM Bina Sejahtera	22	334	2846	6,03
		PKBM Mekar Jaya	60	898		
		PKBM Mareje Lestari	9	140		
		PKBM Sinar Ilmu	20	304		
		PKBM Briuk Pacu Bine	44	660		
		PKBM Persada Mareje	9	135		

		PKBM Putra Mandiri	25	375		
12	Lingsar	PKBM Pelopor Karya	22	336	3256	6,90
		PKBM Batu Ngompal	21	320		
		PKBM Darussalam	27	400		
		PKBM Dharma Santhi	30	452		
		PKBM Karya Peduli	17	250		
		PKBM Assullamy	19	280		
		PKBM Wira Karya Mulya	9	140		
		PKBM Bina Karya Mandiri	21	316		
		PKBM Mekar Jaya	30	450		
		PKBM Zainul Islah	21	312		
13	Narmada	PKBM Bina Mandiri	9	142	1665	3,53
		PKBM Bina Harapan	7	108		
		PKBM Cerdik	3	40		
		PKBM Pelita Bangsa	13	190		
		PKBM Al – Kamal	16	236		
		PKBM Bina Insani	11	171		
		PKBM Cahaya Sedau	11	159		
		PKBM Fastaboqul Khairot	9	140		
		PKBM Tunas Ilmu	5	73		
		PKBM Gema Suranadi	11	162		
		PKBM Harapan Bersama	16	244		
14	Pemenang	PKBM Tunas Maju	30	444	1941	4,12
		PKBM Annur	30	445		
		PKBM Hidyaturrahman	12	177		
		PKBM Teratai Baru	45	675		
		PKBM Seroja	13	200		
15	Sekotong	PKBM Kompak	67	1.004	3319	7,04
		PKBM Ijtihad	103	1.545		
		PKBM Nurul Huda	31	470		
		PKBM Mujahidun	20	300		
Total			3.216	47.168	47.168	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB
Tahun Anggaran 2007

3. Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 03 : Data Tentang Jumlah Kelompok dan Warga Belajar Berdasarkan Lembaga Penyelenggara dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Lembaga/PKBM Penyelenggara	Jumlah Kelompok Belajar	Jumlah Warga Belajar	Jml. /Kecamatan	(%) /Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Praya	PKBM Syafaat	15	200	930	1,48
		PKBM Trasna	13	200		
		PKBM Nurul Jihad	26	400		
		PKBM Serasi Utama Karya	13	130		
2	Praya Barat	PKBM Wahyu	55	830	7064	11,24
		PKBM Al – Amin	44	666		
		LPMN	280	4.200		

		PKBM Handayani	37	568		
		Yayasan Darul Islahul Ummah	10	150		
		PKBM Wiyata Mandala	43	650		
3	Praya Barat Daya	PKBM Peduli	32	490	5783	9,20
		PKBM Tilar Bangsa	30	407		
		PKBM Familier	65	980		
		PKBM Ikhtiar	177	2.219		
		PKBM Beriuk	33	500		
		PKBM Mareje	65	987		
		LSM Bara	20	200		
4	Praya Tengah	Yayasan Landesant	21	315	1928	3,07
		PKBM Bintang Timur	67	1.013		
		PKBM Dien Mas	16	240		
		PKBM Rinjani	24	360		
5	Praya Timur	PKBM Mangku Sari	50	750	9548	15,20
		PKBM Gemilang	160	2.400		
		Pengelola KF PD NW Loteng	400	5.184		
		PKBM Karya Budi	27	404		
		PKBM Kencana	27	405		
		Yayasan Panti Asuhan Nurul Ikhlas	27	405		
6	Jonggat	PKBM Tunas Mandiri	13	200	200	0,32
7	Batukliang	PKBM Nurul Yaqin	33	500	5087	8,06
		PKBM Rengganis	43	642		
		PKBM Nur Ilahi	71	1.065		
		LP2MD	16	240		
		PKBM Banjar Batukliang	9	140		
		STMIK Perguruan Fatahillah NW Teratak	250	2.500		
8	Batukliang Utara	PKBMAsmaul Husnah	33	500	1281	2,04
		PKBM Sejahtera	52	781		
9	Pringgarata	PKBM Hidup Baru	66	1.000	1200	1,91
		PKBM Ikhlas Karya	13	200		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Kopang	PKBM Gema Dharma	17	279	3056	4,86
		PKBM AI - Fathanah	13	200		
		PKBM Bersinar	13	200		
		PKBM Alamanda	56	835		
		PKBM Lopan Jaya	101	1.524		
11	Janepria	PKBM Karya Budi	66	996	3138	4,99
		PKBM Sepoq Angen	93	1.397		
		PKBM Maju Makmur	50	745		
12	Pujut	PKBM Trasna Karya	63	953	7230	11,51
		PKBM AI – Kurba Pade Angen	93	930		
		PKBM Sinar Surya	32	483		
		Yayasan AI Abror Asy Syafiyah	46	700		
		PKBM Putrami	118	1.781		
		PKBM Mas Kencana	33	500		
		PKBM Bumi Gora	75	1.133		
		LKPM NTB	50	750		

13	Pringgerata, Korpang, Janapria, Praya Timur, dan Pujut	IKIP Mataram	648	9.590	9.590	15,26
14	Batukliang, Korpang, Janapria, dan Praya Barat	PKK Propinsi NTB	87	870	870	1,38
15	Praya Tengah, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya	Yayasan Ponpes NU Al - Rusnaniyah	425	5.936	5.936	9,45
Total			4.455	62.826	62.826	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB
Tahun Anggaran 2007

3. Kabupaten Lombok Timur

Tabel 04 : Data Tentang Jumlah Kelompok dan Warga Belajar Berdasarkan Lembaga Penyelenggara dan Kecamatan di Kabpaten Lombok Timur

No	Kecamatan	Lembaga/PKBM Penyelenggara	Jumlah Kelompok Belajar	Jumlah Warga Belajar	Jml. /Kecamatan	(%) /Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Selong	PKBM Nurul Haq	16	242	648	0,99
		PKBM Al - Assyuro	7	105		
		PKBM Bina Sejahtera	10	152		
		LP2ES	10	149		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Sukamulia	PKBM Al - Ikhlas	5	75	545	0,83
		PKBM Bina Karya	18	265		
		PKBM Embulan	1	15		
		PKBM Batu Dendeng	6	90		
		PKBM Hidayatul Amin	7	100		
3	Keruak	PKBM Arrahmaniyah	25	375	2384	3,65
		PKBM Arjanjang	20	375		
		PKBM Al - Akhyar	20	300		
		PKBM Annisa	12	300		
		PKBM Al - Imtihan	14	180		
		PKBM Al - Absory	10	209		
		Yayasan Gema Persada	25	150		
		Lembaga Pemuda Kreatif "LAMPAK"	8	375		
		Yayasan Sekarromah	22	120		
4	Jerowaru	PKBM Al - Nuria	8	120	4705	7,20
		PKBM Tunggal Kayun	66	985		
		PKBM Ngiring Menge	20	300		
		PKBM At - Thoyibah	20	300		
		PKBM LPMP Pade Pacu	150	2.250		

		PKBM LP2M AI – Hidayah	50	750		
5	Sakra	PKBM Murah Hati	7	105	825	1,26
		PKBM Pandan Wangi	8	120		
		PKBM Tunas Harapan	5	75		
		PKBM Nurul Iman	10	150		
		PKBM AI – Yosro	7	105		
		PKBM Pelita Hati	7	105		
		Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa	10	165		
6	Sakra Timur	PKBM Tarbiatul Ummah	7	100		
		PKBM Nur Ilahi	16	240		
		PKBM Maju Bersama	6	90		
		PKBM Jaya Abadi	10	150		
		PKBM Misbahul Ulum	12	180		
		PKBM Bumi Nisantara	9	135		
		Yayasan Bina Masyarakat Mandiri	27	407		
7	Sakra Barat	PKBM AI – Malik	10	150	285	0,44
		PKBM Pade Angen	9	135		
8	Sikur	PKBM Mawar Rindang	20	300	6070	9,29
		PKBM Syahrul Islam	4	60		
		PKBM Handayani	6	90		
		PKBM Mutiara Islam	10	150		
		PKBM Putra Buana	25	380		
		PKBM Nurul Ikhwan	10	150		
		PKBM Wizbul Wathan	15	225		
		PKBM Dahlia Sukma	39	585		
		Yayasan Ponpes Al-Baqitusholihat	255	3.830		
		SKB Lombok Timur	20	300		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Wanasaba	PKBM AI – Hidayah	13	195	1725	2,64
		PKBM AI – Ahliyah	13	195		
		PKBM Tunas Berkah	8	120		
		PKBM Gong Lestari	6	90		
		PKBM Atta'lim	3	50		
		PKBM AI – Lukman	5	75		
		LSKM "SAHAJA"	100	1.000		
10	Aikmel	PKBM Sempurna Jaya	12	180	1065	1,63
		PKBM Jami'atul Islamiah	8	120		
		PKBM Tarbiyatul Ummah	8	120		
		PKBM Jamtuttadris	8	120		
		PKBM As – Syifa	15	225		
		PKBM Jati Suara	10	150		
		PKBM Tunas Kembang	10	150		
11	Terare	PKBM AI – Maun	4	60	599	0,92
		PKBM AI – Urwatul Wutsqo'	4	60		
		PKBM Karya Bersama	7	105		
		PKBM Matahari Terbit	10	149		
		PKBM Terampil Ceria	15	225		
12	Suralaga	PKBM Sullamul Muftadi	18	265	2610	3,10
		PKBM AI – Mubarak	10	150		
		PKBM Islahul Ikhwan	6	90		
		PKBM Fadhillah	7	105		

		P3NF NW	198	2.000		
13	Sambelia	PKBM Nurul Hidayah	7	105	1890	2,69
		PKBM Gelora Madani	59	885		
		PKBM AI – Iqra'	5	75		
		PKBM Obel-Obel Giat	5	75		
		LPMP Montong Dowe	50	750		
14	Sucla	PKBM AI – Khairat	16	239	1409	2,16
		PKBM Syaifurrahman	8	120		
		PKBM Sari Gunung	6	90		
		PKBM Ingin Terampil	7	105		
		PKBM Sinar Harapan	6	90		
		PKBM AI – Husna	14	210		
		PKBM Bahrul Ulum	37	555		
15	Labuhan Aji	PKBM Gerbang Genter	4	60	300	0,46
		PKBM Darul Hikmah	16	240		
16	Pringgesela	PKBM AI – Mujahadah	10	150	229	0,35
		PKBM AI – Fawaid	5	79		
17	Masbagik	PKBM Atta'awun	56	840	2030	3,10
		PKBM AI – Ijtihad	24	360		
		PKBM AI – Khair	5	80		
		Yayasan Bangun Bangsa	50	750		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Pringgebaya	Ponpes AI-Mujahidin NW Mamben	30	450	1033	1,58
		PKBM Nurul Falah	4	60		
		PKBM Ar Royan	10	150		
		PKBM Tunas Muda	8	120		
		PKBM Tunas Baru	6	85		
		PKBM AI – Jadid	3	40		
		PKBM AI – Barokah	8	120		
19	Montong Gading	PKBM Assabirin	10	151	310	0,47
		PKBM AI – Iqra'	6	84		
		PKBM Sinar Harapan	5	75		
20	Sembalun	PKBM Majapahit	5	75	585	0,86
		PKBM AI – Istiqomah	16	240		
		PKBM AI – Ikhlas	10	150		
		PKBM Pendagi	8	120		
21	Keruak, Sikur, Aikmel, Wanabasa, Suralaga, Selong, Sukamulia, Labuhan Haji, Sa-kra, Sakra Timur, dan Sakra Barat	Majelis Pimp. Pemuda Pancasila NTB	800	11.986	11986	18,35

22	Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Sukamulia, Suralaga, Pringgesela, Terara, Wanasaba, Pringgebaya, dan sambelia	PB NW Anjani	1.087	14.292	14.292	21,88
23	Pringgesela, Masbagik, Terara, Selong, Sikur, Keruak, Jerowaru, Sakra, Sakra Barat, dan Sakra Timur	BKOW Propinsi NTB	570	8.550	8.550	13,09
Total			4.588	65.324		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB
Tahun Anggaran 2007

Dari data yang tertera dalam tabel 01 sampai dengan tabel 04, nampak adanya kecenderungan bahwa semakin jauh komunitas dari pusat kota, maka makin tinggi tingkat angka buta aksara dari komunitas tersebut. Kecenderungan tersebut nampak tidak merata pada setiap Kecamatan. Hal ini terkait dengan faktor geografis dan luas wilayah Kecamatan, faktor ekonomi masyarakat, faktor keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta jarak tempuh yang cukup jauh dan alat transportasi yang sulit.

Data tentang sebaran penduduk buta aksara di Pulau Lombok secara ringkas dapat disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 05: Rekapitulasi Data Sebaran Penduduk Buta Aksara
Di Pulau Lombok

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Belajar	Jumlah Warga Belajar	Keterangan (%)
1	Mataram	336	5.026	2,79
2	Lombok Barat	3.216	47.168	26,15
3	Lombok Tengah	4.455	62.826	34,84
4	Lombok Timur	4.588	65.324	36,22
Total		12.595	180.344	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB
Tahun Anggaran 2007

Dari rekapitulasi data di atas, diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk buta aksara yang paling sedikit (rendah) dari empat Kabupaten/Kota di Pulau Lombok adalah Kota Mataram, yakni : 2,79 % dari jumlah penduduk buta aksara di Lombok “180.344” (Dinas Dikpora NTB, 2007), yakni : 5.026 orang. Sementara Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ke dua tinginya, yakni : 26,15 %, dan Kabupaten Lombok Tengah menempati urutan ke tiga tinginya, yakni : 34,84 %; sedangkan Kabupaten Lombok Timur menempati urutan ke empat, yang merupakan peringkat paling tinggi jumlah penduduknya mengalami buta aksara, yakni : 36,22 %. Dari hasil analisis data di atas, juga diperoleh gambaran bahwa semakin komunitas itu jauh dari daerah perkotaan, maka makin tinggi tingkat buta aksara yang dialami komunitas tersebut.

Faktor utama penyebab tingginya buta aksara di Pulau Lombok berdasarkan hasil analisis data penelitian ini adalah: 1) hambatan geografis dan demografis, dimana kelompok buta aksara sebanyak 83,67% yakni sekitar 150.896 orang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil dan terisolir, dengan latar belakang ekonomi yang lemah; 2) Latar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) yang masih tergolong rendah, mengakibatkan rendahnya motivasi dan minat mereka untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara; 3) Alokasi anggaran untuk penuntasan pemberantasan buta aksara dari APBN pusat maupun dari Pemerintah Daerah belum cukup memadai, di samping cairnya anggaran tersebut hampir selalu terlambat, sehingga sasaran yang harus dilayani belum tergarap secara menyeluruh dan tuntas pada setiap tahapan pelaksanaan program Getas Aksara.

Di samping itu, bila dilihat dari usia kelompok masyarakat yang buta aksara yakni : antara usia 30 – 45 Tahun, tingginya angka buta aksara di Pulau Lombok juga disebabkan

beberapa faktor yang secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut : 1) kurangnya fasilitas pembelajaran di masyarakat, yaitu kurangnya gedung sekolah dan jumlah guru saat itu sangat sedikit, sehingga anak-anak yang semestinya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menjadi terhambat, 2) jauhnya komunitas dari pusat sekolah dan alat transportasi yang kurang memadai, serta sulit dijangkau dengan berjalan kaki, mengakibatkan tingginya angka dropout siswa, 3) faktor kemiskinan, yaitu rendahnya pendapatan perkapita masyarakat menyebabkan fokus perhatian masyarakat lebih kepada upaya memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya, dan masalah pendidikan anak-anaknya cenderung terabaikan, dan 4) sosial budaya masyarakat, yakni : pandangan masyarakat tentang “banyak anak banyak rejeki”, “untuk apa sekolah toh juga tidak menjadi pegawai”, dan “kawin musiman” atau kawin cerai, turut memberi andil terhadap tingginya buta aksara di Pulau Lombok.

Berikut ini disajikan data kecenderungan sebaran penduduk buta aksara di Pulau Lombok untuk tahun 2005 dan tahun 2007.

Tabel 06: Rekapitulasi Data Perbandingan Sebaran Penduduk Buta Aksara Di Pulau Lombok Tahun 2005 dan Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Buta Aksara Tahun 2005 (Data BPS NTB, 2005)		Jumlah Penduduk Buta Aksara Tahun 2007 (Data Dinas Dikpora NTB, 2007)	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Mataram	32.616	6,56	5.026	2,79
2	Lombok Barat	142.476	28,64	47.168	26,15
3	Lombok Tengah	179.946	36,18	62.826	34,84
4	Lombok Timur	142.376	28,62	65.324	36,22
Total		497.414	100	180.344	100

Sumber Data : BPS NTB Tahun 2005 dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB Tahun Anggaran 2007

Dari data dalam tabel 06 di atas, tingkat buta aksara di Pulau Lombok nampak ada kecenderungan menurun secara signifikan, yakni dari total buta aksara di Pulau Lombok pada

tahun 2005 mencapai 497.414 orang, turun mejadi 180.344 orang di tahun 2007. Kondisi ini tentunya sangat menggembirakan bagi masyarakat Lombok, karena dalam jangka dua tahun angka buta aksara di Lombok mengalami penurunan yang sangat fantantis, yakni sekitar 63,74 %. Namun, kondisi ini tidak dibarengi dengan penanganan yang kontinyu secara menyeluruh dan tuntas, sehingga kenyataannya saat ini angka buta aksara di Pulau Lombok masih tergolong tinggi. Penurunan tersebut juga nampak unik, dimana Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2005 tingkat buta aksaranya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, namun pada tahun 2007 malah kondisinya menjadi terbalik bahwa Kabupaten Lombok Timur menempati posisi tertinggi tingkat buta aksaranya dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Pulau Lombok. Kondisi ini pula yang menyebabkan Kabupaten Lombok Timur khususnya Kecamatan Jeroaru sejak tahun 2007 sampai saat ini masih dan terus gencar melaksanakan program “GetasAksara”. Sedangkan, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram pelaksanaan program “Getas Aksara” ini mengalami pasang-surut, karena menunggu cairnya dana dari pemerintah. Kondisi ini pulalah yang menjadi alasan utama bahwa penelitian ini terutama difokuskan di Kabupaten Lombok Timur, di samping karena peneitian menekankan bimbingan teknis “(Bintek)” dan uji model bintek.

Pelaksanaan program Getas Aksara di Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Jeroaru) dilihat dari jumlah warga belajarnya sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, terus mengalami peningkatan. PKBM di Pemongkong yang memusatkan kegiatannya pada pemberantasan buta huruf atau keaksaraan ini mulai dirintis pada tahun 2007. Kegiatan itu mula-mula diawali dengan diskusi dan komunikasi bersama antara ketua-ketua RT dan RW di seputar wilayah Pemongkong dengan suatu kesadaran bahwa SDM di Lombok Timur dan terutama di Kecamatan Jerowaru masih sangat rendah. Kemudian mereka melakukan pendataan warga belajar dan menemukan fakta bahwa masih begitu banyak warga yang belum bisa membaca,

menulis dan berhitung, yang dikenal dengan calistung. Dibantu oleh beberapa tenaga tutor suka rela yang berasal dari desa dan beberapa dusun di sekitar wilayah Jerowaru, kegiatan pemberantasan buta huruf di beberapa tempat di seputar Pemongkong ini kemudian berkembang menjadi sekumpulan pusat-pusat sumber belajar yang tersebar di beberapa wilayah pedusunan, yang pada awalnya sesungguhnya dimotori oleh sebuah perkumpulan keluarga berencana (PKBI) setempat, dan kemudian dikukuhkan dalam sebuah wadah bersama yang disebut PKBM ..Mandiri (?).

Kondisi perkembangan Pamong Belajar dan warga belajar “Getas Aksara” di Lombok Timur (Kecamatan Jeroaru) yang menjadi subjek penelitian ini dapat dilihat dalam tabel data berikut :

4.2 Data Pamong Belajar Sebagai Responden

Tabel 07: Data Pamong Belajar Program Getas Sebagai Responden Tahun 2009

No (1)	Nama (2)	Desa/Dusun (3)
01	A. Saleh	Pemongkong
02	A. Saiful Hamdi	Ujung
03	Rodiawan Sofyan	Serumbung
04	Nikmah	Permas
05	Nursiah	Permas
06	Hamijah	Jelok Buso
07	Baiq Hartini	UPT
08	Iq. Yuliana	UPT
09	Idayani Ulfa	Pemongkong
10	Mulyadi	Pemongkong
11	Sumarep	Kaliantan
12	Mustarah	Serumbung
13	Marzuki	Pengoros
14	Abdul Hanan	Kaliantan
15	Lalu Muhtar	Pemongkong
16	Aq. Hamdi	Pemongkong
17	Ahmad Zaidun	Jelok Buso
18	Irma Suriyani	Jelok Buso
19	Milasih	Pemongkong
20	Aq. Heri	Pemongkong
21	Marianti	Serumbung
22	Abdul Kadir	Ujung
23	Yuliana Citra	Pengoros
24	Sukirman	Pengoros

Berdasarkan hasil analisis kegiatan survey lapangan di atas, maka tim bintek segera mengadakan pertemuan dan menyusun rencana tindakan selanjutnya. Berdasarkan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2009, maka disepakati untuk menyusun program bintek sebagaimana diharapkan oleh pamong belajar (subjek penelitian). Salah satu program yang paling diharapkan oleh pamong belajar adalah “Program Pembinaan dalam Bidang Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran”.

Pelaksanaan program ini pada awalnya disepakati oleh pamong belajar setelah bulan puasa, namun karena berabagai kondisi dan kesibukan masing-masing yang dimiliki oleh pamong belajar maka kegiatan ini baru dapat direalisasikan pada tanggal 21 Oktober 2009. Motivasi dari Pamong Belajar dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, hal ini nampak dari keseriusan dan keantusiasan mereka dalam diskusi dan tanya jawab, ulet dan tekun mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Jumlah Pamong Belajar yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 24 orang sebagaimana terdapat dalam tabel 07 di atas. Kendala utama yang mereka hadapi dalam mengikuti kegiatan semacam ini, hanyalah masalah waktu atau kesempatan yang mereka miliki, mengingat mereka sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga tentu memiliki tanggungjawab pada keluarganya masing-masing.

“Program Pembinaan dalam Bidang Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran” ini dimulai dari tahap penggodokan di tingkat Pamong Belajar dan selanjutnya diteruskan dengan kegiatan pendampingan terhadap Pamong dan Warga Belajar oleh tim bintek. Selanjutnya Pamong Belajar mengimplementasikan program ini pada Warga Belajar melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kemajuan dan hasil implementasi program ini, tim bintek melakukan monev secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pamong belajar terhadap warga belajar.

Oleh karena sebagian besar warga belajarnya pada pagi dan siang hari bekerja di sawah atau pergi melaut atau menjadi buruh tani atau pasar, maka pelaksanaan kegiatan

belajarnya diadakan pada malam hari dengan frekwensi 2 x (dua kali) seminggu atau kadang kadang 1 x saja seminggu, tetapi kadang juga 3 x samapai 4 x seminggu, bergantung musim. Melihat antusiasme warga masyarakat yang buta huruf begitu besar, para warga yang sudah maju pendidikannya (lulusan SMA atau PT) dan mempunyai waktu luang terpanggil untuk menjadi tutor dan para tutor pun terangsang untuk membantu meningkatkan partisipasinya di dalam memelekkkan warga masyarakat di sekitarnya itu. Para tutor pun saling memotivasi dan termotivasi serta tertantang oleh antusiasme warganya yang ingin melek huruf, dan disertai pula oleh keinginan yang kuat dari para warga untuk belajar. Perkembangan kondisi warga belajar di Desa Pamongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2007 sampai tahun 2009, digambarkan dalam tabel berikut.

4.3 Data Warga Belajar Sebagai Subjek Penelitian

Tabel 08: Data Warga Belajar Program Getas Sebagai Subjek Penelitian ("Bintek") Tahun 2009

Nama Dusun	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
	Jumlah Dusun	Jumlah Warga Belaar	Jumlah Dusun	Jumlah Warga Belaar	Jumlah Dusun	Jumlah Warga Belaar
Serumbung	6	14	7	14	8	14
Ujung		14		14		14
Pemongkong		15		15		15
Jelok Buso		15		15		15
Kaliantan		12		12		12
Pengoros		13		13		13
Permas	-	-	-	16	-	16
Lendang Lombok	-	-	-	-	-	15
Total		83		99		114

Melihat keberadaan PKBI ini cukup aktif dan berperan di dalam mengurangi angka buta huruf di wilayahnya, maka pemerintahan di kecamatan Jerowaru pun memberikan peluang kepada para tutor untuk meningkatkan keterampilannya dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar serta pengelolaan PKBM, sehingga salah seorang tutornya dapat diberangkatkan ke Yogyakarta untuk melakukan studi banding. Hasilnya, di samping mendapat pengalaman bagaimana memberdayakan masyarakat dalam bidang pendidikan, peserta ini juga dilatih untuk mengatasi *human trafficking* (perdagangan manusia), karena perdagangan manusia juga dapat diberantas melalui jalur pendidikan dan dalam banyak kasus perdagangan manusia yang terlibat adalah para warga masyarakat yang note bena adalah buta huruf.

Keberadaan KF di Pemongkong ternyata juga mengalami pasang surut. Pada musim-musim banyak kerja bagi warga masyarakat di wilayah sekitar, misalnya pada musim tanam padi dan tanam tembakau, kegiatan pembelajaran hanya dilaksanakan 1 sampai dengan 2 x (dua kali) seminggu. Akan tetapi, pada saat-saat musim paceklik (kemarau) kegiatan KF dapat berlangsung 3 x sampai 4 x (empat kali) setiap minggu. Dalam hal ini para tutor tidak memberlakukan waktu belajar yang ketat, namun diserahkan sepenuhnya pada kelonggaran waktu warga belajar dan kesepakatan diantara mereka. Merekapun menyepakati sendiri kapan waktu belajar mereka, apakah pagi atau sore. Melihat pelaksanaan dan antusiasme warga belajar yang ingin bisa mencapai calistung, warga masyarakat yang merasa mampu pun mengulurkan tangannya untuk membantu secara finansial membelikan alat belajar, seperti alat tulis dan papan tulis. Walaupun sebenarnya warga sendiri, terutama yang sudah senior, tidak mau belajar menulis, hanya mau bisa membaca dan berhitung saja, tetapi melalui kegiatan ini para tutor tetap memberikan motivasi dan menjelaskan pentingnya mereka melek huruf. Di dalam kegiatan ini, anatar lain yang ditekankan adalah bahwa kegiatan ini penting dan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari, terutama misalnya agar tidak tertipu oleh

orang ataupun oleh suatu produk dagang yang mereka perlukan sehari-hari. Dengan kata lain, di sini tutor menekankan bagaimana agar ketika membeli suatu produk mereka membaca dulu label produk itu atau paling tidak mengetahui apa isi sebuah kemasan produk (gula, sabun, garam, rokok, dan lain-lain) sehingga mereka ketika membeli tidak salah ambil, misalnya mau membeli gula tetapi ternyata yang dibawa pulang adalah kemasan garam, dan lain sebagainya.

[The page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the paper. No specific content can be discerned.]

BAB V

PENGEMBANGAN MODEL BINTEK

5.1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya buta aksara.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ternyata masyarakat penyandang buta aksara yang ada di masyarakat profilnya sangat bervariasi. Variasi profilnya mulai dari rentang usia, latar belakang masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan kondisi geografisnya. Di Lombok daerah-daerah yang cenderung masyarakatnya menyandang buta aksara dapat dilihat dari beberapa ciri khas atau profile masyarakat dan daerahnya sebagai berikut ;

- a. Dilihat dari kelompok usia, buta aksara yang ada di NTB dilihat dari usianya kelompok usia yang lebih banyak mengalami buta aksara adalah penduduk usia diatas 20 tahun. Hal ini terjadi karena berbagai factor penyebabnya, seperti karena akses mereka terhadap pendidikan masih terbatas, kesadaran terhadap pendidikan masih rendah, kemiskinan dsbnya.
- b. Karakteristik daerah, daerah-daerah yang secara geografis terpencil dan terpencar, serta termasuk daerah tandus masyarakatnya lebih berpotensi menyandang buta aksara dari pada yang berada di daerah yang lebih mudah mengakses sekolah dan daerah yang relative lebih subur.
- c. Mata Pencaharian, penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan tradisional dan tinggal dipesisir pantai lebih besar persentasenya mengalami buta aksara dari pada masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan mata pencaharian yang lainnya.
- d. Potensi daerah, maksudnya adalah daerah tandus dan kering yang penduduknya kehidupannya bergantung pada alam sekitarnya juga merupakan potensi terjadinya buta aksara.
- e. Nilai social budaya, ada nilai-nilai budaya di masyarakat yang menganggap bahwa sekolah dan atau pendidikan itu tidak penting bagi kehidupannya, masyarakat yang orientasi

hidupnya hari ini atau kebutuhan sesaat, pola hidup pragmatis merupakan potensi terjadinya buta aksara.

Berdasarkan profile daerah yang mesyarakatnya cenderung mengalami buta aksara dan tidak pernah tuntas dari buta aksara seperti ditemukan diatas, dan tetap tingginya masyarakat penyandang buta aksara di Lombok, factor penyebabnya dapat dikelompokan menjadi tiga. Tiga factor penyebab tetap tingginya jumlah masyarakat penyandang buta aksara di Lombok adalah

- a. Buta aksara yang disebabkan oleh masyarakat terutama usia sekolah tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar terutama di kelas rendah atau DO SD kelas rendah. Kelompok ini menjadi penyandang buta aksara baru yang umumnya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki profile-profile seperti disebutkan diatas.
- b. Tingkat ketuntasan keaksaraan rendah. Telah lama didaerah lombok dilakukan pemberantasan buta aksara tetapi ketuntasan atau ketercapaian ketuntasan buta aksara atau capaian melek huruf bagi warga belajar sangat rendah. Tingkat ketuntasan umumnya terjadi sekitar 10-15%. Banyaknya peserta belajar yang belum tuntas, tetapi sering dilaporkan telah tuntas, atau masyarakat yang pernah ikut keaksaraan fungsional sudah diaktegorikan tuntas buta aksara. Kondisi ini menyebabkan terjadi pembengkakan atau peningkatan jumlah penyandang buta aksara, bila dilakukan pendataan ulang yang lebih cermat. Rendahnya pencapaian ketuntas buta aksara atau melek huruf pada warga belajar juga disebabkan oleh motivasi dan budaya belajar dan atau kesadaran terhadap pendidikan rendah disamping disebabkan oleh latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Hasil wawancara kepada pengelola dan tutor keaksaraan tentang program pemerintah daerah dalam memberantas buta aksara di NTB pada tahun 2009, menunjukkan bahwa *program kegiatan pemberantasan buta*

aksara belum berorientasi pada ketuntasan warga belajar dari buta aksara, tetapi sistemnya lebih pada target waktu dan target jumlah warga belajar. Target waktu yang dimaksudkan kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 32 kali pertemuan (idealnya). Target 32 kali pertemuan seperti system kredit semester di pendidikan formal tidak dapat dengan mudah diterapkan di pendidikan nonformal, penerapan system ini perlu memperhatikan berbagai hal yang nampaknya sepele tetapi berpengaruh terhadap capaian hasil. Misalnya kendala alam seperti hujan, dan terjadinya pemadaman listrik dapat mengurangi frekuensi yang ditargetkan. Karena sebagian besar kegiatan pemberantasan buta aksaran dilakukan di malam hari. Disamping itu masyarakat yang belajar konsentrasinya tidak penuh untuk belajar tetapi kedatangan mereka ketempat belajar lebih besar didorong oleh karena adanya insentif atau melaksanakan tugas atau kewajiban bagi warga yang disebut buta aksara.

- c. Masyarakat yang telah melek aksara pada tingkat dasar tidak memperoleh penanganan dan pembinaan lanjutan, sehingga beberapa waktu kemudian mereka kembali menyandang buta aksara. Kondisi ini mendongkrak jumlah masyarakat buta aksara bila dilakukan pendataan kembali yang lebih akurat. Semestinya setelah masyarakat melek aksara perlu memiliki kegiatan untuk memanfaatkan dan mengasah kemampuan yang telah dicapainya. Kegiatan yang dilakukan manta warga belajar membutuhkan pendampingan dan diikuti dengan melakukan pertemuan sesama warga belajar dengan pendamping dan atau tutor.

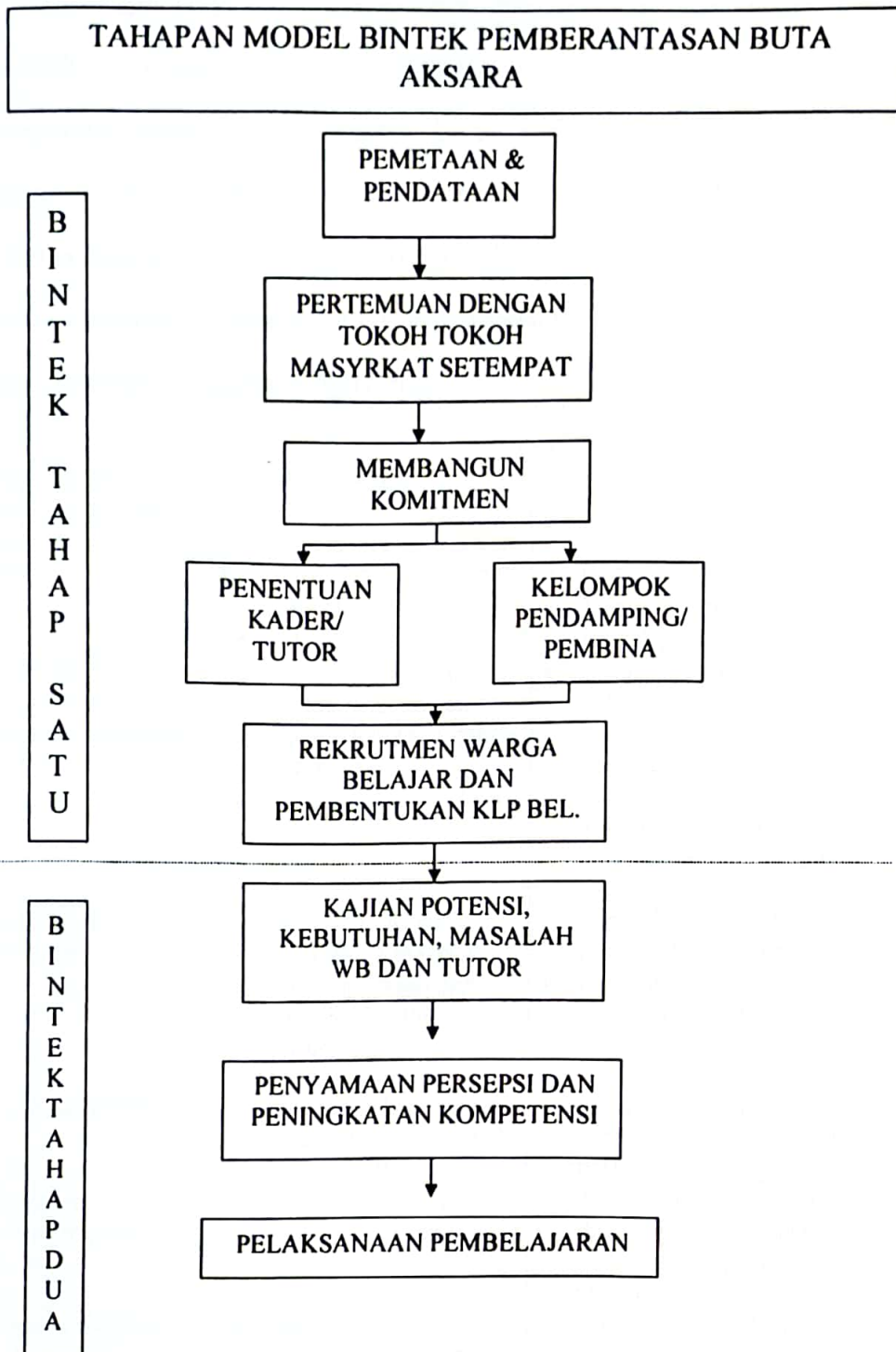
5.2. Pengembangan Model Bintek dan Pembelajaran

Berdasarkan factor-faktor penyebab dan profile daerah yang masyarakatnya cenderung mengalami buta aksara, dalam penelitian ini dilakukan pengembangan model bimbingan teknis (Model BINTEK) dan model pembelajaran (Model Pembelajaran) pemberantasan buta aksara bagi warga masyarakat yang menyandang status buta aksara. Model bimbingan teknis

dan model belajar yang dikembangkan dalam penelitian didasarkan pada hasil kajian data dan kegiatan yang dilakukan. Adapun kriteria yang diusahakan untuk dipenuhi agar dapat mencapai target atau tercapai ketuntasan buta aksara lebih tinggi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan dilakukan berbasis masyarakat, artinya kegiatan pemberantasan buta aksara dilakukan didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk belajar dan dengan didukung oleh elemen serta anggota masyarakat termasuk anggota keluarganya.
2. Yang melakukan pendampingan atau tutor adalah masyarakat yang sudah dikenal baik oleh warga belajar dan berasal dari lingkungan masyarakat pembelajar.
3. Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan.
4. pembinaan dan pendampingan dilakukan secara komprehensif.
5. Pembelajaran bersifat fungsional dan menyangkut kebutuhan keseharian masyarakat yang belajar.
6. Pembina, pendamping dan tutor memiliki jiwa polentir atau mempunyai rasa pengabdian terhadap masyarakatnya sendiri.
7. Diantara komponen dan pihak yang terlibat lebih sering melakukan pertemuan untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pembinaan.
8. Adanya kesamaan persepsi untuk semua pihak dan elemen yang terlibat.

Adapun model Bintek yang telah dikembangkan dan diuji cobakan yang memenuhi kriteria yang disebutkan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Model BinteK pemberantan buta aksara yang dikembangkan diatas adalah sebagai berikut.

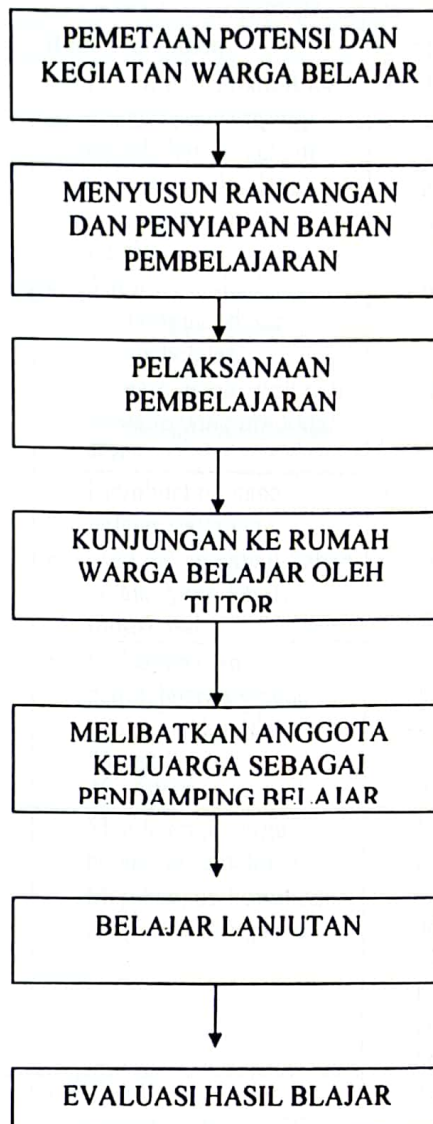
Bimbingan teknis dalam pemberantasan buta aksara diatas terdiri dari dua tahap. Kedua tahap dilakukan dengan system berbasis masyarakat atau dibangun dengan semangat pemberdayaan masyarakat agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara kontinyu dan koprehensif dan menjadi tanggung jawab bersama. *Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dsetiap tahap dan langkah kegiatan dalam model dengan mengacu pada target capaian ditiap langkah atau tahap kegiatan.* Adapun hal yang dilakukan dan capaian yang ditarget disetiap tahap adalah sebagai berikut;

Tahap Bintek	Bentuk kegiatan	Target Capaian
Bintek Tahap satu		
Pemetaan dan pendataan	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan penggalian data masyarakat buta aksara • Pemetaan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Data masyarakat buta aksara • Profile warga belajar • Tokoh masyarakat dan elemen yang dapat dilibatkan
Pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan informal dengan masyarakat yang ditokohkan dan tokoh formal 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kebersamaan dalam membangun masyarakat dilingannya • Membangun kepekaan terhadap masalah dilingkungannya dengan menyamakan hasl kajian
Membangun komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Menyepakati program kegiatan keaksaraan. • Membagi tugas dan tanggung jawab/ kesepakatan mengambil peran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan pelaksanaan program keaksaraan. • Pembagian peran dan keepakatan untuk membangun masyarakat
Penentuan kader/ tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan kader/tutor oleh masyarakat/ tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tutor atau kader yan akan memfasilitasi warga belajar dalam belajar
Kelompok pendamping dan pembina	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kelompok pendamping dan pembina 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok Pembina dan pendamping yang sekaligus sebagai tenaga monev
Rekrutmen warga belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih dan menentukan warga belajar. • Tokoh masyarakat dan pendamping lainnya mndorong masyarakat untuk belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok belajar yang memang butuh dan ada semangat untuk belajar

• Bintek Tahap Dua		
Kajian potensi, kebutuhan, masalah WB dan Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan antara pengembang dengan belajar • Pertemuan pengembang/ pendamping dengan tutor 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpetakannya potensi tutor dan warga belajar ebagai dasar merancang kegiatan belajar selanjutnya. • Terdatanya masalah dan kebutuhan tutor maupun warga belajar untuk diselesaikan dan dienuhi agar kegiatan belajar lebih efektif
Penyamaan persepsi dan peningkatan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan/latihan sesuai dengan kebutuhan. • Menentukan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi tutor dan warga belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Samanya persepsi dan pemahaman tutor dalam melaksanakan pebelajaran • Tutor memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. • Terbangunnya jaringan untuk menopang efktifitas kegiatan • Pendamping dan pembina lapangan melakukan pengadministrasian dan monev berkelanjutan
Pelaksanaan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. • Adanya catatan perkembangan kemampuan warga belajar dan catatan yang berkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Model pembelajaran yang dikembangkan dan diuji cobakan dapat dilihat pada gambar model pembelajaran di bawah ini. Gambaran model pembelajaran dibawah ini merupakan gambaran satu tahap kegiatan. Tahap kegiatan selanjutnya, tahap kegiatannya relative sama hanya berbeda pada langkah pertama. Langkah pertama pada awal kegiatan tutor bersma pendamping melakukan pemetaan potensi da kegiatan keseharian warga belajar, sementara kegiatan awal pada putaran atau tahap kegiatan belajar berikutnya lebih ditekankan pada kajian masalah atau Kendala yang dihadapi oleh warga belajar dan capaian yang telah dicapai.

MODEL PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL



Bentuk kegiatan dan capaian yang ditargetkan disetiap langkah kegiatan model pembelajaran pemberantasan buta aksara sebagai berikut:

Tahap model belajar	Bentuk kegiatan	Target capaian
Pemetaan potensi dan kegiatan warga belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan antara tutor dengan pendamping membahas pemetaan potensi dan kegiatan keseharian warga belajar. • Tutor menjajagi kemampuan dasar warga belajar • <i>Pemetaan masalah dan kendala yang dihadapi WB</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpetanya potensi awal dan kegiatan keseharian dari aga beajar. • Adanya bahan rujukan ntuk mengembangkan bahan dan rancangan pembelajaran. • <i>Terpetakannya masalah dan kendala yang dihadapi warga belajar</i>
Menyusun rancangan belajar dan bahan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana belajar sederhana. • Menyiakan bahan-bahan belajar yang lebih fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rancangan belajar • Ada kesiapan bahan belajar yang bersifat fungsional
Pelaksanaan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu dan ditempat yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan jadwal yang disepakati antara tutor dengan warga belajar
Kunjungan tutor ke rumah warga belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Mendatangi warga belajar kerumahnya. • Membangun komitmen anggota keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendekatkan hubungan antara tutor dengan warga belajar dan anggota keluarganya. • Mendorong warga belajar dan anggota keluarganya untuk belajar
Melibatkan anggota keluarga sebagai pendamping dalam belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong keterlibatan anggota keluarga WB • Meminta anggota keluarga memberi tulisan terhdap barang dan eralatan yang digunakan keseharian oleh WB 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibatnya anggota keluarga dalam kegiatan belajar WB. • WB mengenal huruf /kata/angka disetiap mengambil alat, menaruh dan sebagainya. • Belajar tdak hanya ditempat belajar tetapi konrehensif dan berkelanjutan (disetiap aktifitas dan setiap saat)

Belajar lanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Belajar berlanjut sesuai dengan jadwal yang disepakati	<ul style="list-style-type: none">• Semangat belajar terus tumbuh.• Lebih bersemangat datang ketempat belajar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
-------------------------	--	---

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Jumlah penduduk buta aksara yang paling sedikit (rendah) dari empat Kabupaten/Kota di Pulau Lombok adalah Kota Mataram, yakni : 2,79 % dari jumlah penduduk buta aksara di Lombok "180.344" (Dinas Dikpora NTB, 2007), yakni : 5.026 orang. Sementara Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ke dua tingginya, yakni : 26,15 %, dan Kabupaten Lombok Tengah menempati urutan ke tiga tingginya, yakni : 34,84 %; sedangkan Kabupaten Lombok Timur menempati urutan ke empat, yang merupakan peringkat paling tinggi jumlah penduduknya mengalami buta aksara, yakni : 36,22 %. Juga diperoleh gambaran bahwa semakin komunitas itu jauh dari daerah perkotaan, maka makin tinggi tingkat buta aksara yang dialami komunitas tersebut.

Faktor utama penyebab tingginya buta aksara di Pulau Lombok berdasarkan hasil analisis data penelitian ini adalah: 1) hambatan geografis dan demografis, dimana kelompok buta aksara sebanyak 83,67% yakni sekitar 150.896 orang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil dan terisolir, dengan latar belakang ekonomi yang lemah; 2) Latar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) yang masih tergolong rendah, mengakibatkan rendahnya motivasi dan minat mereka untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara.

Di Lombok daerah-daerah yang cenderung masyarakatnya menyandang buta aksara dapat dilihat dari beberapa ciri khas atau profile masyarakat dan daerahnya sebagai berikut ; (1) Dilihat dari kelompok usia, (2) Karakteristik daerah. (3) Mata Pencaharian penduduk; (4). Potensi daerah; (5) Nilai social budaya masyarakat.

Tiga factor penyebab tetap tingginya jumlah masyarakat penyandang buta aksara di Lombok adalah ; (1) DO SD kelas rendah; (2).Tingkat ketuntasan keaksaraan rendah; (3) Masyarakat yang telah melek aksara pada tingkat dasar tidak memperoleh penanganan dan pembinaan lanjutan.

Kreteria model bintek dan belajar yang dikembangkan untuk mencapai target atau tercapai ketuntasan buta aksara lebih tinggi sebagai berikut : (1) Kegiatan dilakukan berbasis masyarakat; (2) Melibatkan dan memfungsikan SDM setempat; (3) Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan; (4) Ppembinaan dan pendampingan dilakukan secara koprehensif; (5) Pembelajaran bersifat fungsional; (6) Pembina, pendamping dan tutor memiliki jiwa polentir atau mempunyai rasa pengabdian terhadap masyarakatnya sendiri; (7). Frekuensi pertemuan untuk pembenahan; (8). Adanya kesamaan persepsi untuk semua pihak dan elemen yang terlibat.

Model Bintek yang dihasilkan merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari dua tahap bintek dan di masing-masing tahap bintekl terdiri dari beberapa tahap kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

Model pembelajaran dalam keaksaraan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan model belajar berbasis masyarakat dan berbasis keluarga secara sinergis, yang dalam penerapannya dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa melakukan pembenahan dan atau perbaikan penarapannya.

6.2. Saran Tindak

Agar sistem pembinaan teknis dan pembelajaran dalam pemberantasan buta aksara yang dilakukan lebih efektif untuk menuntaskan masyarakat buta aksara menjadi melek huruf yang lebih bersifat permanen maka disarankan kepada pihak-pihak pemda, dinas pendidikan bagian pendidikan luar sekolah dan stake holder yang lainnya disarankan untuk melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ary H. Gunawan, 1986, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Bina Aksara : Jakarta
- BPS, NTB, 2007. *Statistik Pendidikan Propinsi NTB*. Mataram: BPS NTB.
- Djudju Sudjana, 2001, Pendidikan Luar Sekolah, *Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah dan Teori Pendukung, serta Asas*, Falah Production : Jakarta
- Djufri, D.M., 2001, Satandar Minimal Manajemen Pusat Kegiatan Masyarakat Berbasis Masyarakat, BPKB Jayagiri : Jakarta
- Dikpora, NTB, 2007. *Profil Pendidikan NTB*. Mataram: Dikpora NTB.
- Onny S. Prijono, A.M.W. Pranarka, 1979, Situasi Pendidikan di Indonesia Selang Sepuluh Tahun Terakhir, Yayasan Proklamasi : Jakarta
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi, Ace, 2006. *Tantangan dan Arah Baru Kebijakan Ditjen PLS*. Jakarta: Makalah.
- Syafruddin, 2009. *Pengembangan Model Pengarusutamaan Jender untuk Meningkatkan Partisipasi dan Aksesibilitas Anak Perempuan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di NTB* (Hasil Penelitian). Mataram: Lemlit Universitas Mataram
- Soedomo, 1989, Pendidikan Luar Sekolah , *Kearah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat*, Dirjendikti : Jakarta
- Soedijarto, 1997, Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Memasuki Abad Ke 21, PT. Sidi Alins Corporation : Jakarta
- Umberto Sihombing, 2001, Pendidikan Luar Sekolah, *Masalah, Tantangan, dan Peluang*, Wirakarsa : Jakarta
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2005. *Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta. TKPK
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2006. *Panduan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta. TKPK

Daftar Hadir Peserta Bintek Program Penuntasan Keaksaraan

Hari : *Kamis*

Tanggal : *15/11* 2009

Tempat : Desa Pemongkong / Jeroaru / Lotim

No	Nama	Desa/Dusun	Tanda Tangan
01	A. Saleh	Pemongkong	01. <i>Saleh</i>
02	A. Saiful Hamdi	Ujung	02. <i>Saiful</i>
03	Rodiawan Sofyan	Serumbung	03. <i>Rodiawan</i>
04	Nikmah	Permas	04. <i>Nikmah</i>
05	Nursiah	Permas	05. <i>Nursiah</i>
06	Hamijah	Jelok Buso	06. <i>Hamijah</i>
07	Baiq Hartini	UPT	07. <i>Hartini</i>
08	Iq. Yuliana	UPT	08. <i>Iq. Yuliana</i>
09	Idayani Ulfa	Pemongkong	09. <i>Idayani</i>
10	Mulyadi	Pemongkong	10. <i>Mulyadi</i>
11	Sumarep	Kaliantan	11. <i>Sumarep</i>
12	Mustarah	Serumbung	12. <i>Mustarah</i>
13	Marzuki	Pengoros	13. <i>Marzuki</i>
14	Abdul Hanan	Kaliantan	14. <i>Abdul Hanan</i>
15	Lalu Muhtar	Pemongkong	15. <i>Lalu Muhtar</i>
16	Aq. Hamdi	Pemongkong	16. <i>Aq. Hamdi</i>
17	Ahmad Zaidun	Jelok Buso	17. <i>Ahmad Zaidun</i>
18	Irma Suriyani	Jelok Buso	18. <i>Irma Suriyani</i>
19	Milasih	Pemongkong	19. <i>Milasih</i>
20	Aq. Heri	Pemongkong	20. <i>Aq. Heri</i>
21	Marianti	Serumbung	21. <i>Marianti</i>
22	Abdul Kadir	Ujung	22. <i>Abdul Kadir</i>
23	Yuliana Citra	Pengoros	23. <i>Yuliana Citra</i>
24	Sukirman	Pengoros	24. <i>Sukirman</i>

Mataram, 2009

Ketua tim Bintek

(Drs. I Noman Karma, M.Si)

Daftar Hadir Peserta Bintek Program Penuntasan Keaksaraan

Hari :

Tanggal : 22 - 11 2009

Tempat : Desa Pemongkong / Jeroaru / Lotim

No	Nama	Desa/Dusun	Tanda Tangan
01	A. Saleh	Pemongkong	01.
02	A. Saiful Hamdi	Ujung	02.
03	Rodiawan Sofyan	Serumbung	03.
04	Nikmah	Permas	04.
05	Nursiah	Permas	05.
06	Hamijah	Jelok Buso	06.
07	Baiq Hartini	UPT	07.
08	Iq. Yuliana	UPT	08.
09	Idayani Ulfa	Pemongkong	09.
10	Mulyadi	Pemongkong	10.
11	Sumarep	Kaliantan	11.
12	Mustarah	Serumbung	12.
13	Marzuki	Pengoros	13.
14	Abdul Hanan	Kaliantan	14.
15	Lalu Muhtar	Pemongkong	15.
16	Aq. Hamdi	Pemongkong	16.
17	Ahmad Zaidun	Jelok Buso	17.
18	Irma Suriyani	Jelok Buso	18.
19	Milasih	Pemongkong	19.
20	Aq. Heri	Pemongkong	20.
21	Marianti	Serumbung	21.
22	Abdul Kadir	Ujung	22.
23	Yuliana Citra	Pengoros	23.
24	Sukirman	Pengoros	24.

Mataram, 2009

Ketua tim Bintek

(Drs. I Noman Karma, M.Si)



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009**

Nomor : 62-SP.SN./H18.12.2/PL/2009

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Yusuf A. Sutaryono, Ph.D.** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. I Nyoman Karma, M.Si** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul : **"Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis (BINTEK) Pada Program Penuntasan Keaksaraan di Pulau Lombok NTB"**
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 70.000.000,-** (Tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada **DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008.**
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama **70% x Rp. 70.000.000,- = Rp. 49.000.000,-** (Empat puluh sembilan juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

- b. Tahap kedua $30\% \times \text{Rp. } 70.000.000. = \text{Rp. } 21.000.000.-$ (dua puluh satu juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 8 (delapan) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 25 Maret 2009 dan berakhir sampai dengan tanggal 25 November 2009;

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan kepada tim pemantau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan Laporan Akhir Hasil Penelitian sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengupayakan dan/atau menindak lanjuti penelitian seperti termaktub dalam pasal 1 untuk menghasilkan: (1) publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi internasional, dan/atau (2) publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional, dan/atau (3) teknologi tepat guna, dan/atau (4) model pembelajaran, dan/atau (5) model pemberdayaan masyarakat, dan/atau (6) temuan baru berupa invensi yang dapat dipatenkan, dan/atau (7) buku ajar yang dipergunakan sebagai pegangan mahasiswa, dan/atau (8) teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan/atau (9) terjalannya hubungan kerjasama internasional;
- d. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak berakhimya pelaksanaan penelitian;
- e. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
- f. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.;
- g. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- h. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 7
PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian; dan
 - c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian):
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - e. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 4 (empat) eksemplar 3 (tiga) bulan setelah PIHAK KEDUA menerima dana penelitian tahap pertama.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK PERTAMA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
 - (1) Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 - (2) Warna cover (sampul) coklat muda;
 - (3) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

**Diblayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009
Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2008, Tanggal 31 Desember 2008.**
 - e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **tanggal 25 November 2009** yang terdiri atas:
 - (1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* (CD dalam format MS Word) sebanyak 2 (dua) keping CD;
 - (2) Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman; dan
 - (3) Copy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar..

Pasal 8
PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- (2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti atau yang berkompeten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1). Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 10
PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran DIPA Universitas Mataram diserahkan kepada Universitas Mataram, setelah pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 **SANKSI**

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
- (2) Bagi pelaksana penelitian yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal **15 Desember 2009**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 13 **PERUBAHAN ISI PERJANJIAN**

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14 **PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua,

Prof. Ir. Yusuf A. Sutaryono, Ph.D.
NIP. 131475069

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian,

Drs. I Nyoman Karma, M.Si
NIP. 131642688



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 623873 Fax. 634918 Mataram 83125

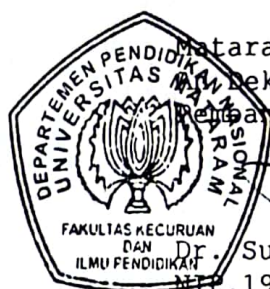
SURAT TUGAS

Nomor : 225/H18.5/PL/2009

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,
dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Drs. I Nyoman Karma, M.Si
Nip : 131642688
Unit Kerja : FKIP Universitas Mataram
Tugas : Melakukan Tugas Penelitian Dengan Judul:
"Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis
(bintek) Program Penuntasan Pendidikan
Keaksaraan di Pulau Lombok NTB."
Lama Kegiatan : 12 (dua Belas) Bulan
Anggota : 1.Drs. I Nyoman Suarta, M.Si
2.Dr. Syafruddin, M.S
3.Dr. Sudirman Wilian, MA

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.



Mataram, 29 Juli 2009

Dekan,
Rekan tu Dekan I

Dr. Sudirman Wilian, MA
NIP.195905051985021001

Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen P2T APBN-RM (Ex Pembangunan) Universitas Mataram
 Nomor : 1350/H18.11.4/KU/2009
 Tanggal : 4 April 2009

**DAFTAR NAMA-NAMA PENELITI DAN JUDUL PROPOSAL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
 UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2009**

No	Nama Peneliti Utama	Nama Anggota Peneliti	JUDUL PROPOSAL PENELITIAN	JUMLAH DANA PENELITIAN (Rp)	Kata Kunci	Luaran
1	Dr. Yayuk Andayani, M.Si	Prof.Dr. Dwi Soeitya Dyah Jekti, M.Kes Aliefman Hakim, M.Si	Aktivitas Anti Malaria dan Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Ekstrak Buah, Daun dan Kulit Batang Artocarpus Camansi	75.000.000	Anti Malaria	1). Sediaan ekstrak Artocarpus camansi yang berpotensi sebagai Anti Malaria. 2) publikasi artikel ilmiah nasional/ internasional
2	Sujita, ST., MT	Agus Dwi Catur, ST.,MT Arif Mulyanto, ST.,MT	Pengembangan Abrasive Water Jet Polishing Untuk Mendukung Industri Pengrajin Mulia Di Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.	52.000.000	Abrasive water jet polishing, industri pengrajin mutiara	Teknologi tepat guna berupa water jet polishing dengan media abrasive glass bead, yang merupakan teknologi baru dalam bidang pengolahan/ pemolesan mutiara.
3	Ir. Amiruddin, M.Si	Ir. M. Siddik, MS Ir. M. Muchson, SU Ir. Nuning Juniarsih, M.Sos	Perilaku Ekonomi dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok	75.000.000	Masyarakat Miskin	Ditemukan pola perilaku ekonomi rumah tangga sebagai dasar untuk menyusun model dan program aksi pengembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok.
4	Ir. Muktasam, M.Agr.Sc., Ph.D	Ir. Siti Nurjannah, M.Si	Kajian Kritis Atas Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat : Sebuah Aplikasi Pendekatan Action Research Bagi Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan	65.000.000	Krisis Atas Kemiskinan	Komoditi sosial, ekonomi dan lingkungan dari ketiga desa yang dikategorikan sebagai desa-desa "sangat miskin" di tiga kec. Di Kab. Lombok Barat.
5	Sukardi, S.Pd., M.Pd	Dr. Wildan, M.Pd Burhanuddin, S.Pd., M.Hum	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dan Orang Tua Murid Dalam Pendidikan SD/MI: Ke Arah Peningkatan Kualitas Pembelajaran Berbasis Masyarakat	72.000.000	Pemberdayaan	Model pemberdayaan masyarakat dan orang tua murid dalam pendidikan SD/MI sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran (BI, IPS, IPA) berbasis masyarakat yang meliputi aspek 1. Pengembangan kurikulum pembelajaran (BI, I

62	Drs. I Nyoman Karma, M.Si	Drs. I Nyoman Suarta, M.Si Dr. Syafruddin, MS Dr. Sudirman Wiliyan, MA	Analisis Model Implementasi Bimbingan Teknis (BINTEK) Pada Program Penuntasan Keaksaraan di Pulau Lombok NTB	70.000.000	Bimbingan Teknis	Gambaran yang akurat tentang sebab-sebab dan faktor sosial budaya apa yang menimbulkan tingginya angka buta aksara pada komunitas masyarakat Sasak di Pulau Lombok sehingga dapat disusun model implementasi bimbingan
63	Israfil, SH., M.Hum	Syafruddin, SH, M.Hum M. Hotibul Islam, SH, M.Hum	Model Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Kultural dan Agama di NTB	70.000.000	Konflik Horizontal dan Agama di NTB	Pola baru tentang penyelesaian konflik horizontal dalam masyarakat NTB sebagai bahan artikel ilmiah
64	Salim HS., SH., MS	Dr. Idrus Abdullah, SH.	Pola Penyelesaian Sengketa Tambang (Studi Kasus Terhadap Sengketa Antara Masyarakat Etnis Samawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara	52.000.000	Sengketa Masyarakat Samawa dengan PT NNT	Perumusan model penyelesaian sengketa tambang yang menyeluruh berupa model penyelesaian sengketa yang menggunakan norma norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lingkaran tambang atau lazim di sebut dengan pranata lokal.
65	Drs. Karim aluddin Yusra, M.P., Ph.D	Yuni Budi Lestari, S.Pd., MA	Konstruksi Solidaritas Antaretnis Masyarakat Sumbawa dan Masyarakat Sasak Transmigran di Desa Tolo Oi Kabupaten Sumbawa	52.000.000	Antaretnis	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana masyarakat transmigran mengkonstruksi solidaritas antar etnis antar sesama transmigran
66	Dr. Prayitno Basuki, MA	Drs. Lutfidin, M.Si Drs. Taufik Chaidir, M.Si	Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB	60.000.000	Pencapaian Indeks Pembangunan NTB	Perbaikan implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang lebih responsif dalam rangka meningkatkan IPM di Provinsi Nsa Tenggara Barat

Menget. J.
Universitas Mataram
Rektor.

Prof. Ir. H. Mansur Ma'shum, Ph.D.
NIP. 130516837

Mataram, 4 April 2009
P2T APBN/ARM Universitas Mataram
Pejabat Pembuat Komitmen.

Ir. H. M. Yasin, M.Si.
NIP. 131416990

Curriculum Vitae Personalia Penelitian

1. Identitas diri

Nama Lengkap : Drs. I Nyoman Karma, M.Si.
Jenis kelamin : Laki-laki
Pangkat/Gol./NIP : Pembina Tk.1/IV/b/ 131642688
Jabatan : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : FKIP Universitas Mataram
Alamat Kantor : Jl.Majapahit 62 Mataram, Telp. (0370) 623873
Alamat Rumah : Jl. Pagsangan Indah VIII/06 Mtr.,Telp. (0370) 645711

2. Riwayat Pendidikan

No	Jenis Pend.	Tempat	Tahun	Ijazah	Spesialisasi
1	SDN	Petak	1971		
2	MPN	Tampak Siring	1975		
3	SMEAN	Gianyar	1980		Tata Buku
4	FKIP Unud	Singaraja	1985	Sarjana (Drs.)	Ilmu Pendidikan (Bimbingan Konseling)
5	Pascasarjana	Unpad Bandung	2002	Master (M.Si.)	Psikologi Perkembangan

3. Pengalaman Penelitian

- 3.1 Efektivitas Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar dan Lanjut, Memimpin Diskusi Kelompok Kecil, dan Upaya Perbaikannya di dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Dasar, 1998.
- 3.2 Studi Kelayakan tentang Intensitas Kebutuhan Petugas Bimbingan dan Penyuluhan di SMAN Se-Pulau Lombok, 1990.
- 3.3 Hubungan antara Pola Pengasuhan Orangtua dan Otonomi Remaja (*Studi tentang Remaja Pertengahan dalam Perspektif Psikologi Perkembangan dan Konteks Nilai Budaya Sasak pada Siswa SMUN di Daerah Kabupaten Lombok Barat*), 2002.
- 3.4 Hubungan antara Tingkah Laku Berprestasi dan Prestasi Belajar (*Studi Deskriptif-Analitik pada Mahasiswa FKIP Universitas Mataram*), 2004.

4. Publikasi Ilmiah

- 4.1 Hubungan antara Pola Pengasuhan Orangtua dan Otonomi Remaja (*Studi tentang Remaja Pertengahan dalam Perspektif Psikologi Perkembangan dan Konteks Nilai Budaya Sasak pada Siswa SMUN di Daerah Kabupaten Lombok Barat*), Jurnal Psikologi, Vol.9, Nomor 1, Maret 2002.
- 4.2 Dampak Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Perkembangan Kepribadian dan Perilaku Anak, Jurnal Ilmu Pendidikan, Nomor 55, Th. XV, September 2003.
- 4.3 Hubungan antara Tingkah Laku Berprestasi dan Prestasi Belajar (*Studi Deskriptif-Analitik pada Mahasiswa FKIP Universitas Mataram*), Jurnal Penelitian Unram, Vol. 2, Nomor 6 Agustus 2004.
- 3.4 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pelaksanaannya di Sekolah Dasar, Majalah Oriza, Vol. IV, Nomor 3 Oktober 2005.

Mataram, 10 Desember 2008

Drs. I Nyoman Karma, M.Si.

Curriculum Vitae Personalia Penelitian

1. Identitas diri

Nama Lengkap : Dr. Sudirman Wilian, M.A.
Jenis kelamin : Laki-laki
Pangkat/Gol./NIP : Pembina/IV/a/ 131453576
Jabatan : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : FKIP Universitas Mataram
Alamat Kantor : Jl.Majapahit 62 Mataram, Telp. (0370) 623873
Alamat Rumah : Jl. Bangil VI/No.13 Mataram,Telp. (0370) 624647

2. Riwayat Pendidikan

No	Jenis Pend.	Tempat	Tahun	Ijazah	Spesialisasi
1	SD	Aikmel	1971		
2	MP	Aikmel	1974		
3	SMAN	Mataram	1977		Sosbud
4	IKIP	Malang	1983	Sarjana (Drs.)	B. Inggris
5	Univ. of Arizona	Arizona(USA)	1994	Master (M.A.)	TEFL
6	Short Course Prog.	Singapore Oct	1999		Specialist Curriculum and Materials Development
7	Pelatihan Statstk Tk Dasar	P3M UI Jakarta	2004	Sertifikat	
8	S3	Jakarta	2006	Doktor	Linguistik

3. Pengalaman Penelitian

- 3.1 Interfensi Sintaksis Bahasa Indonesia terhadap Bhs. Inggris Tulis Mahasiswa Prog. D2. Bhs. Inggris.
- 3.2 Studi tentang Kemampuan Menerjemahkan secara Sintaktis Guru SMP se- Kotif Mataram.
- 3.3 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Domain Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat.
- 3.4 Studi Perbandingan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMP yang Menerapkan Pendekatan CBSA dengan yang Tidak Menerapkan CBSA se-Kotif Mataram Th. 1988/1989.
- 3.5 Motivasi dan Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa S1/ING/I Th 1988/89 yang Mempunyai Penguasaan Baik dalam Bahasa Inggris.
- 3.6 Unsur Puisi Lama dalam Kesusatraan Indonesia Modern.
- 3.7 Struktur, Jenis dan Fungsi Takhayul dalam Masyarakat Sasak.
- 3.8 Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinnekatunggalikaan dan Pengajaranya :Penyusunan Bahan Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memamfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat (RUT,1997).
- 3.9 Kontruksi Ergatif dan Antipasif dalam Bahasa Osing: Suatu Pendekatan Alternatif (Dikti, 1996)

- 3.10 Evaluasi Kinerja Lulusan Program Penyetaraan S1 PGSM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (PGSM, Th. 2000)
 - 3.11 Motivasi, Kebiasaan Belajar, dan Kemampuan Komunikasi Bahasa Inggris Siswa Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat (Dikti, Th. 2001)
 - 3.12 Pemertahanan Bahasa dan Pergeseran Identitas Etnis: Kajian atas Dwibahasawan Sumbawa-Sasak di Lombok. *Disertasi*, Universitas Indonesia (2006)
4. Publikasi Ilmiah
- 4.1 Pendekatan Komunikatif dalam Pengajaran Bahasa Asing : Tinjauan Kurikulum Bahasa Inggris SMA 1994, Seminar Bulan Bahasa FKIP, Oktober 1994
 - 4.2 Forms of Address in Sasak, AKSARA 1995.
 - 4.3 English and Indonesian Noun Phrase: Structure and Variability in Word Order, Gema Rinjani, 1997.
 - 4.4 Masalah dan problematika dalam penerjemahan; Suatu Tinjauan Teoritis, Gema Rinjani, 1997
 - 4.5 Bahasa Minoritas, Identitas Etnis, dan Kebertahanan Bahasa: Kasus Bahasa Sumbawa di Lombok. Dalam *Linguistik Indonesia*. Tahun ke-23 No.1: 89–102.
 - 4.6 Tingkat Tutur Dalam Bahasa Sasak dan Bahasa Jawa: Komentar atas Tulisan Nothofer "A Preliminary Analysis of the History of Sasak Language Levels". (Akan terbit dalam *Wacana* 2006.)

Mataram, 10 Desember 2008

Drs. Sudirman Wilian, M.A.